



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

KANTOR BUPATI BLITAR



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

2025-2029

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BLITAR



CALL CENTER UPT PPA KABUPATEN BLITAR
0811-3045-200



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas P3APPKB) Kabupaten Blitar periode Tahun 2025-2029 dapat terselesaikan.

Renstra PD ini disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029. Renstra PD Tahun 2025-2029 memuat 10 program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikatornya untuk 2 (dua) urusan yaitu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam rangka mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 yaitu **“KABUPATEN BLITAR BERJAYA DAN BERDAYA”**, Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar mengampu Tujuan Renstra PD yaitu Meningkatnya Kualitas Pembangunan Gender Dan Anak Serta Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk dengan Sasaran Renstra PD diantaranya:

1. Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
2. Meningkatnya Perlindungan Anak.
3. Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas.
4. Meningkatnya Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat.

Dengan tersusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 ini diharapkan mampu mendukung kinerja Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar, sehingga program, kegiatan dan sub kegiatan lebih fokus dan lebih terarah di dalam mendukung tercapainya Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2025-2029.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian penyusunan Renstra ini. Akhirnya kami berharap semoga Renstra ini dapat bermanfaat dalam menunjang segala kegiatan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Blitar, 19 September 2025

Plt. Kepala Dinas,
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana,


Drs. MIKHAEL HANKAM INDORO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670929 199202 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR GAMBAR..... iv

DAFTAR TABEL v

BAB PENDAHULUAN..... I-1

1.1 Latar belakang..... I-1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-2

1.3 Maksud dan tujuan I-5

1.4 Sistematika Penulisan I-5

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH II-1

2.1 Gambaran Pelayanan II-1

2.1.1 Stuktur Organisasi II-1

2.1.2 Sumberdaya II-5

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah..... II-10

2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah II-22

2.1.5 Kelompok Sasaran..... II-25

2.1.6 Mitra Kerjasama II-25

2.1.7 Dukungan BUMD II-26

2.1.8 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggungjawab II-26

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis..... II-26

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH

KEBIJAKAN..... III-1

3.1 Tujuan III-1

3.2 Sasaran III-1

3.3 Strategi..... III-11

3.4 Arah Kebijakan III-11

3.4.1 Arah Kebijakan III-11

3.4.2 Tahapan Renstra PD..... III-12

3.4.3 Lokus Renstra PD III-14

3.4.4 Perangkat Daerah Sebagai Pengampu Standart Pelayanan Minimal III-14

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN IV-1

4.1 Program..... IV-1

4.2 Kegiatan IV-2

4.3 Subkegiatan IV-20

4.4 Program, Kegiatan Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah IV-72

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Perangkat Daerah	IV-73
4.6 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	
Perangkat Daerah	IV-74
BAB V PENUTUP.....	V-1
5.1 Kesimpulan Substansi.....	IV-1
5.2 Kaidah Pelaksanaan	IV-1
5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi	IV-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Perubahan Renstra PDI-2

Gambar 2.1 Stuktur Organisasi II-4

Gambar 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin II-5

Gambar 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan II-6

Gambar 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan II-6

Gambar 2.5 Grafik Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan II-15

Gambar 2.6 Grafik Rasio Akseptor KB II-16

Gambar 2.7 Grafik Indeks Pemberdayaan Gender II-17

Gambar 2.8 Grafik Indeks Pembanguana Keluarga..... II-22

Gambar 3.1 Cascading..... III-3

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi..... II-7

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021-2024..... II-11

Table 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendaan Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2021 s.d 2024 II-23

Tabel 2.4 Perumusan Isu Strategis II-32

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat
Daerah III-8

Tabel 3.2 Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategi Perangkat Daerah III-11

Tabel 3.3 Arah Kebijakan III-12

Tabel 3.4 Tahapan Strategi Perangkat Daerah III-13

Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan IV-3

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Rencana
Pendanaan IV-21

Tabel 4.3 Daftar Program Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah..... IV-72

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) IV-74

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK)..... IV-75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

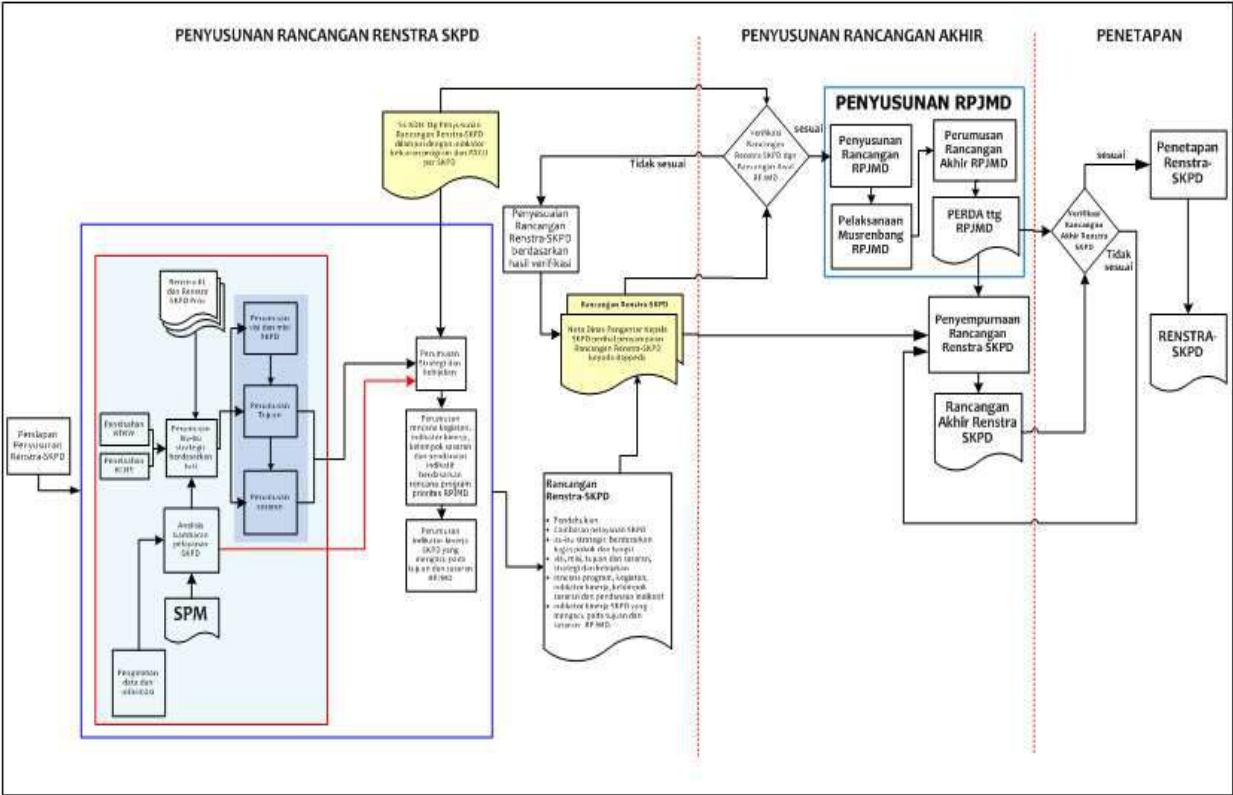
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Kepala Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah, serta memuat arah kebijakan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya, perangkat daerah juga menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode Tahun 2025-2029 dengan mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Blitar serta memperhatikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blitar.

Dokumen Renstra PD Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk menyempurnakan sinergitas Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan. Dengan telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Blitar periode Tahun 2025-2029 yaitu Drs. H. Rijanto, MM, dan H. Beky Herdihansah, maka Pemerintah Kabupaten Blitar memasuki era baru pemerintahan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Kabupaten Blitar merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029 sesuai kewenangan Perangkat daerah, serta sebagai kontrak kinerja antara Kepala Daerah yang memastikan efektifitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun depan. Penyusunan Renstra Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar ditindaklanjuti berdasarkan Surat Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategi Perangkat Daerah. Selain itu, penyusunan Renstra juga mengamanatkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar sebagai tujuan pedoman operasional pembangunan 5 (lima) tahun perangkat daerah, dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan, serta instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja. Renstra PD juga berfungsi sebagai dasar akuntabilitas kinerja, memastikan sinergi dan konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan. Renstra PD Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar juga memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat Nasional maupun Provinsi.

Tahapan Penyusunan Renstra PD Kabupaten Blitar dapat digambarkan dalam gambar 1.1 sebagai berikut:



Gambar 1.1

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra PD

(Sumber: Sekretaris Daerah, 2021)

Renstra PD selanjutnya menjadi Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Selain itu, Renstra PD menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas P3APKB Kabupaten Blitar, baik evaluasi Renstra PD maupun evaluasi Renja PD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum Penyusunan Renstra PD tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the elimination of all forms of discrimination against women*) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 dengan penjelasan tambahan Nomor 5606);
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
- 11) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

- 12) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi terhadap Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
- 13) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 592);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 15) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 23);
- 16) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 57);
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah 10/E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 82);
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029;
- 21) Peraturan Bupati Blitar Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra PD) Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar dimaksudkan untuk memberikan arahan rencana yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar yang disusun berdasarkan Pedoman RPJMD.

Selanjutnya tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra PD) Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar yaitu sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan.
- 2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur selama kurun waktu (5) lima tahun
- 3) Sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar.
- 4) Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar dalam kurun waktu (5) lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar muatan dokumen.

BAB II. Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Sub bab ini ini memuat tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah, dan kelompok sasaran pelayanan Perangkat Daerah.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan Perangkat Daerah.

BAB III. Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sub bab ini menjelaskan Tujuan Perangkat Daerah yang selaras dengan RPJMD Tahun 2025-2029.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Pada sub bab ini menjelaskan Sasaran Perangkat Daerah yang selaras dengan RPJMD Tahun 2025-2029.

3.3 Strategi

Sub bab ini mengemukakan Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

3.4 Arah Kebijakan

Pada sub bab ini mengemukakan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB IV. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.1 Program

Sub bab ini menyajikan Program Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya.

4.2 Kegiatan

Sub bab ini menyajikan Kegiatan Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya.

4.3 Sub Kegiatan

Pada sub bab ini menjelaskan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan disertai dengan penjelasan definisi operasional serta rumus perhitungan.

4.4 Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas

Sub bab ini menyajikan prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama

Pada sub bab ini menyajikan target keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Sub bab ini mengemukakan target keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V. Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan

2.1.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut.

1. Kedudukan

Kedudukan Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar adalah unsur pendukung tugas Bupati dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas

Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dan melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta tugas pembantuan.

3. Fungsi

Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar mempunyai fungsi :

- a. Penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.
- d. Pengoordinasian pelaksanaan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.
- e. Pengoordinasian pembinaan penyelenggaraan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.

- f. Pengoordinasian pelaksanaan administrasi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.
- g. Penetapan dan validasi laporan kinerja secara periodik kepada bupati; dan
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan bupati.

4. Susunan Organisasi

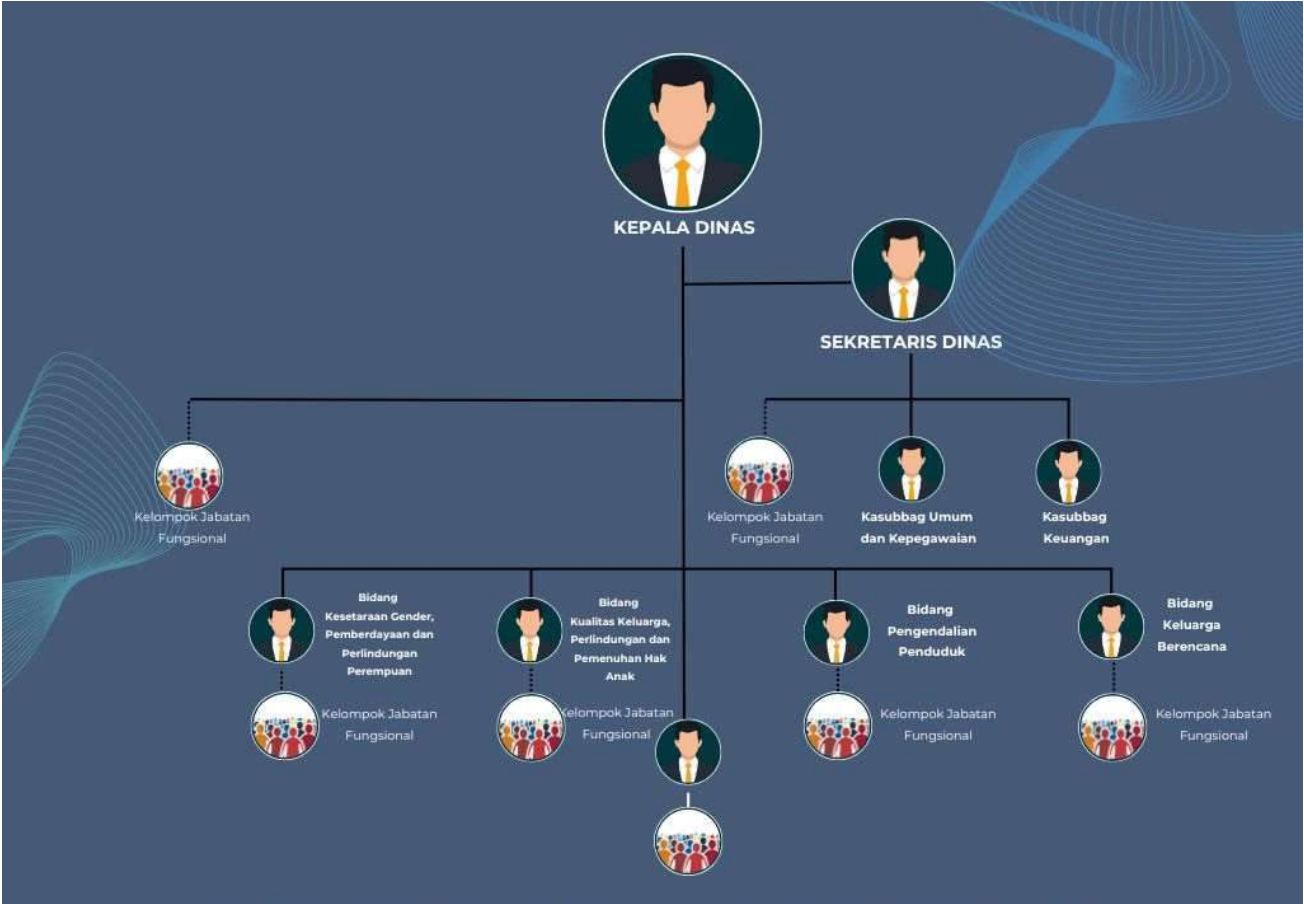
Susunan Organisasi Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
 - 1. Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Adapun susunan organisasi sekretariat sebagai berikut:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b) Sub Bagian Keuangan.
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 2. Masing-masing Bidang dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Adapun susunan organisasi bidang Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar sebagai berikut:
 - a) Bidang Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b) Bidang Kualitas Keluarga, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c) Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d) Bidang Keluarga Berencana, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 3. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPT PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah hukum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPT PPA menyelenggarakan fungsi antara lain: pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelola kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan

korban. Susunan organisasi UPT PPA pada Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar, dipimpin oleh Kepala UPT PPA dan untuk menjalankan tugas layanan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Bagan Struktur Organisasi Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar disajikan pada gambar 2.1 sebagai berikut:

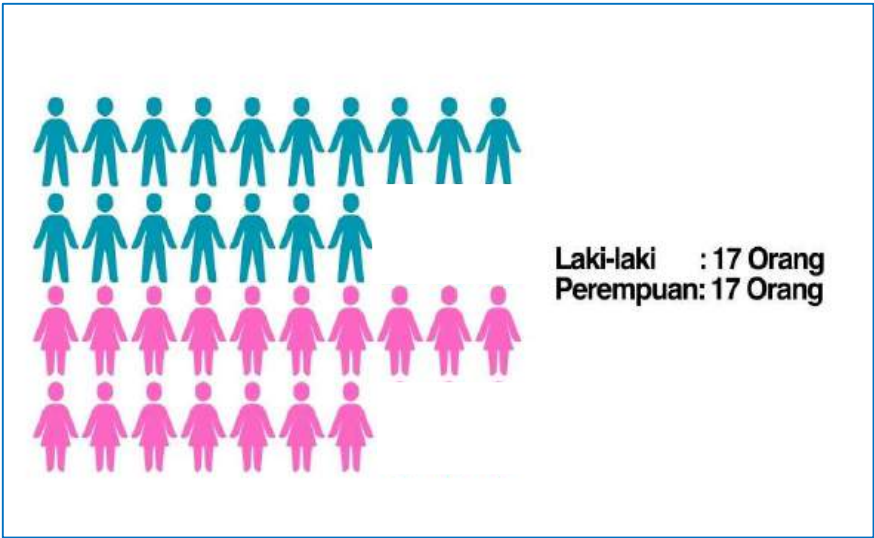
Gambar 2.1 Stuktur Organisasi Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar



Sumber: Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar, 2022

2.1.2 Sumberdaya Perangkat Daerah

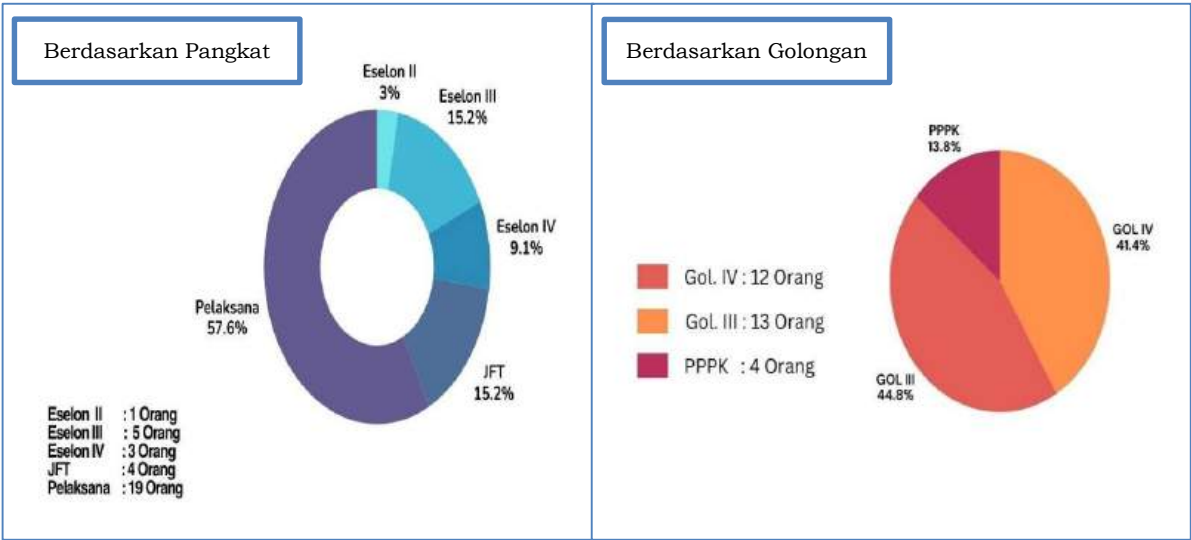
Dalam menunjang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh sumberdaya manusia. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin di Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar disajikan pada gambar 2.2 sebagai berikut.



Gambar 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

menunjukkan jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin terdapat sebanyak 17 orang laki-laki dan sebanyak 17 orang perempuan. Dengan adanya komposisi pegawai yang sama antara laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa tidak ada hambatan dalam mendukung kelancaran operasional organisasi secara keseluruhan.

Data pegawai di Dinas P3APPKB berdasarkan pangkat dan golongan akan disajikan pada gambar 2.3 sebagai berikut.



Gambar 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

2.3 diatas menunjukkan pegawai pada Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar didukung sebanyak 34 ASN dan Non ASN dengan komposisi 19 orang (57,96%) sebagai tenaga pelaksana. Sedangkan, jumlah pegawai ASN berdasarkan golongan, didominasi oleh Golongan III sebesar 44,8% atau sebanyak 13 orang.

Hal ini menunjukkan Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar memiliki potensi dalam menjalankan tugas manajerial dan kompetensi teknis.

Tingkat pendidikan pegawai pada Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar disajikan pada gambar 2.4 sebagai berikut.



Gambar 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

(Sumber : Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar, 2025)

Berdasarkan gambar 2.4 diatas, jumlah pegawai di Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar menurut tingkat pendidikan yang dominan memiliki latar belakang pendidikan Strata I (S1) sebanyak 19 orang. Selanjutnya, diikuti Tingkat Pendidikan Pasca Sarjana (S2) sebanyak 11 orang. Komposisi pegawai di Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar mayoritas memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, menunjukkan bahwa cukup ideal untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, dalam menunjang pelaksanaan tugas administratif dan pelayanan kepada masyarakat, Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar juga di dukung oleh Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 7 orang.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas, Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar juga didukung oleh sarana dan prasarana. Pengelolaan sarana dan prasarana berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara. Selanjutnya, dalam tatacara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 12 Tahun 2018.

Kondisi Eksisting Barang Milik Daerah Bulan Agustus Tahun 2025 di Dinas P3APPKBKabupaten Blitar, sebagaimana tercantum dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi

No	Jumlah Sarana dan Prasarana	Kondisi			Jumlah
		Baik	Kurang Baik	Rusak	
1	Tanah Bangunan Rumah Negara	1			1
2	P.C Unit	65		14	79
3	Laptop	75	15	15	105
4	Tablet PC	40			40
5	Hard Disk			7	7
6	Printer	77		33	110
7	Modem			15	15
8	Kendaraan Roda 4	5			5
9	Sepeda Motor	127	2		129
10	Lemari Besi/ Metal	4		1	5
11	Lemari Kayu			9	9
12	Rak Kayu			2	2
13	Filling Cabinet Besi			8	8
14	Lemari Makan			2	2
15	Papan Visual/ Papan Nama			4	4
16	White Board		2		2
17	Alat Penghancur Kertas	2			2
18	Alat Pemotong Kertas			1	1
19	LCD Projector/ Infocus	34			34
20	Papan Nama Instansi	25			25
21	Papan Pengumuman	75		2	77
22	Tempat Tidur Kayu			1	1
23	Meja Kerja Kayu	12			12
24	Meja Rapat	30			30
25	Meja Resepsionis		1		1
26	Meja ½ Biro	40	4		44
27	Kursi Rapat	406			406
28	Kursi Tamu	1	1		2
29	Kursi Putar	4			4
30	Kursi Biasa	4			4
31	Meja Komputer			5	5
32	Sofa	10			10
33	Meubeleur Lainnya	2	22		24
34	Lemari Es	1	2		3
35	Lemari Kaca			4	4
36	AC Window	5	4		9
37	AC Split	20			20
38	Kipas Angin	2		19	21
39	Exhause Fan	14			14
40	Rice Cooker (Alat Dapur)	1			1
41	Televisi	1		2	3
42	Wireless			28	28
43	Camera Video	4		1	5
44	Alat Hiasan	1			1
45	Dispenser	1			1
46	Handy Cam	1			1
47	Alat Rumah Tangga Lainnya		2		2
48	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2			2
49	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	7			7
50	Kursi Kerja Eselon II	2			2

No	Jumlah Sarana dan Prasarana	Kondisi			Jumlah
		Baik	Kurang Baik	Rusak	
51	Kursi Kerja Eselon III	2			2
52	Kursi Kerja Eselon IV	13			13
53	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	54			54
54	Audio Distribution	1			1
55	Microphone/ Wireless MIC	1			1
56	Professional Sound System	1			1
57	Layar Film/ Proyektor	61		4	65
58	Telephone Mobile	68			68
59	Pesawat Telephone			1	1
60	Alat Kedokteran Keluarga Berencana Lainnya	471		189	660
61	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan Lainnya			11	11
62	CPU (Peralatan Mainframe)			1	1
63	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)			3	3
64	Rak Besi/ Metal			7	7
65	Lemari Makan			2	2
66	Kursi Lipat			3	3
67	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II			1	1
68	Kursi Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	1			1
69	Kursi Fiber Glas/ Plastik	12			12
70	Brankas	4			4
71	Lambang Garuda Pancasila			2	2
72	Gambar Presiden/ Wakil Presiden			2	2
73	Buffet Kaca		1		1
74	Peta			1	1
75	Timbangan Barang			1	1
76	Tabung Gas			1	1
77	Alat Pembersih Lainnya	2			2
78	Bangunan Gedung Kantor Permanen	25			25
79	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1			1
80	Bangunan Gedung Tertutup Permanen	1			1
81	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	7			7
82	Rumah Negara Golongan II Type C Permanen	1			1
83	Jaringan Distribusi Tegangan 1 s/d 20 KVA	3			3
Total		1829	54	403	2263

(Sumber : Dinas P3AP2KB Kabupaten Blitar, 2025)

Melihat pada kondisi sarana prasarana yang dimiliki Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar saat ini secara umum sudah mencukupi untuk mendukung operasional kegiatan dalam melaksanakan kegiatan. Dari sisi perlengkapan dan peralatan kantor sudah cukup

dalam menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran, namun perlu ada penambahan karena ada sebagian yang dalam kondisi kurang baik dan rusak. Saat ini sudah terbangun balai KB bagi PKB/PLKB di 22 kecamatan sehingga akan semakin mendukung kinerja pelayanan khususnya di bidang Keluarga Berencana. Untuk operasional di lapangan pada saat ini para pejabat eselon maupun PKB/PLKB sudah mendapat kendaraan dinas roda dua atau roda empat.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas P3APPKB Tahun 2025-2029 berupa analisis gambaran pelayanan yang diharapkan mampu mengidentifikasi:

1. Tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas P3APPKB periode sebelumnya dan indikator sesuai urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas P3APPKB, potensi dan permasalahan pelayanan Dinas P3APPKB, dan
2. Potensi dan permasalahan aspek pengelolaan keuangan Dinas P3APPKB.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Indikator Kinerja Utama																
1	Kategori APE	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Nindya	Madya	Pratama	Pratama	n/a	-	-	-	-	-
2	Kategori KLA	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Utama	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	-	-	-	-	-
3	Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	87,14	87,88	87,64	87,76	87,95	61,26	62,25	65,45	52,25	57,41	70,30	70,84	74,68	59,54	65,28
4	Total Fertility rate (Angka Kelahiran Total)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,47	1,39	1,27	1,99	2,0	73,5	69,5	63,5	99,5	100,5
5	Rasio Akseptor KB	13,20	14,15	14,15	14,16	14,17	13,2	13,20	12,78	15,14	15,64	100,00	93,29	90,32	106,92	110,37
6	Nilai dan Predikat SAKIP	A	A	A	A	A	A	B	BB	BB	CC	-	-	-	-	-
Indikator Kinerja Kunci																
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	61,00	65,00	65,00	70,00	70,25	65,00	76,64	71,72	71,85	18,21	106,56	117,91	110,34	102,64	25,92
2	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	90,62	90,62	90,62	92,10	93,35	100	100	100	100	98,36	110,35	110,35	110,35	108,58	105,37

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
3	Indeks Pemberdayaan Gender	78,50	78,50	78,50	78,95	80,05	78,5	78,5	79,68	81,32	81,82	100,00	100,00	101,50	103,00	102,21
4	Indeks Perlindungan Anak	-	-	-	-	71,95	70,02	65,06	65,64	67,77	n/a	-	-	-	-	-
5	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	90,62	90,62	90,62	90,62	92,00	100	100	100	100	100	110,35	110,35	110,35	110,35	108,70
Indikator Kinerja Program																
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	61,00	65,00	65,00	70,00	70,25	65,00	76,64	71,72	71,85	18,21	106,56	117,91	110,34	102,64	25,92
2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	2,13	3,51	3,51	3,65	3,75	2,67	2,66	2,17	0,63	4,80	125,35	75,78	61,82	17,26	128,00
3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	22,90	30,50	30,55	30,65	31,05	22,90	23,74	19,74	43,80	27,31	100,00	77,84	64,62	142,90	87,95
4	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (PER 100.000 penduduk)	0,00	6,10	6,10	6,07	6,02	3,46	4,70	4,23	0,00	12,44	0,00	77,05	69,34	0,00	206,64
5	Cakupan keluarga berkualitas yang memenuhi kriteria kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak	10,00	10,00	10,00	12,00	14,00	25,35	28,20	30,05	31,03	31,42	253,50	282,00	300,50	258,58	224,43

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
6	Persentase profil data gender dan anak yang digunakan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Kategori KLA	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Utama	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	-	-	-	-	-
8	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	90,62	90,62	90,62	90,62	92,00	100	100	100	100	100	110,35	110,35	110,35	110,35	108,70
9	Median Usia Kawin Pertama	18,80	18,80	19,40	19,80	20,60	24,0	23,0	27,0	21,3	22,0	127,66	122,34	139,18	107,58	106,80
10	ASFR	9,82	9,82	9,63	9,24	9,05	0,43	8,42	6,20	19,70	18,70	4,38	85,74	64,38	213,20	206,63
11	Unmetneed	8,51	8,51	8,51	8,20	8,00	8,51	7,99	16,82	15,86	8,60	100,00	93,89	197,65	193,41	107,50
12	Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)	0,00	51,11	51,11	51,58	51,97	0,00	56,10	57,28	61,15	62,00	0,00	109,76	112,07	118,55	119,30

(Sumber : Dinas P3AP2KB Kabupaten Blitar, 2025)

Capaian sasaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan dengan berbagai indikator kinerja, antara lain:

1. Kategori Parahita Ekapraya

Anugrah Parahita Ekapraya (APE) Dalam penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan ajang apresiasi Kementerian PPPA RI kepada daerah atas keberhasilan dan prakarsa dalam pencapaian Pembangunan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diselenggarakan oleh Kementerian PPPA Republik Indonesia. Tahun 2023, Penghargaan Kabupaten Blitar mengalami penurunan dari predikat madya menjadi predikat pratama, hal ini juga dialami oleh mayoritas Kabupaten/Kota di Seluruh Republik Indonesia dikarenakan adanya revitalisasi pengarusutamaan gender dimana terdapat beberapa indikator penilaian yang lebih detail sehingga memerlukan waktu untuk dapat melakukan penyesuaian. Capaian Pratama tersebut merupakan hasil verifikasi dan validasi lapang yang dilakukan oleh tim penilai pada tahun 2023, sedangkan untuk tahun 2024 tidak dilaksanakan penilaian atas penghargaan APE oleh Kementerian PPPA RI.

2. Kabupaten Layak Anak

Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan Penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Kabupaten atau Kota yang memiliki sistem pembangunan hak dan perlindungan khusus anak secara menyeluruh, berkelanjutan, dan terencana. Pada tahun 2025 untuk kinerja KLA tercapai realisasi sesuai target yaitu nindya dari target nindya dimana target ini berhasil diraih sejak tahun 2021.

3. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan merupakan indikator yang memperlihatkan besarnya angkatan kerja perempuan di Kabupaten Blitar. Cara menghitung Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan yaitu dengan menjumlahkan perempuan berusia 15 tahun ke atas yang bekerja (baik di pemerintahan maupun swasta) dibagi jumlah penduduk perempuan berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mencari kerja (pengangguran terbuka) kali 100%. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Blitar tahun 2021 sampai dengan 2024 disajikan pada gambar 2.5 sebagai berikut.



Gambar 2.5 Grafik Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

(Sumber : Dinas P3AP2KB Kabupaten Blitar, 2025)

Berdasarkan gambar 2.5 diatas menunjukkan Persentase Angkatan Kerja Perempuan di tahun 2020 sebesar 61,28%, tahun 2021 sebesar 62,25%, selanjutnya pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 65,45%. Tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 52,25%, namun pada tahun 2024 meningkat kembali menjadi 57,41%. Hal ini menunjukkan kondisi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja mulai membaik.

Data Kementerian PPA Republik Indonesia menyebutkan, capaian kinerja Tahun 2024 partisipasi angkatan kerja perempuan untuk Provinsi Jawa Timur sebesar 60,64% dan Nasional sebesar 56,42%. Hal ini menjadi perhatian dari berbagai pihak sehingga diperlukan berbagai upaya terpadu dari pemerintah, swasta dan masyarakat. Strategi ini mencakup peningkatan akses pendidikan dan keterampilan, penyediaan fasilitas pendukung, serta perubahan budaya yang mendukung kesetaraan gender.

4. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

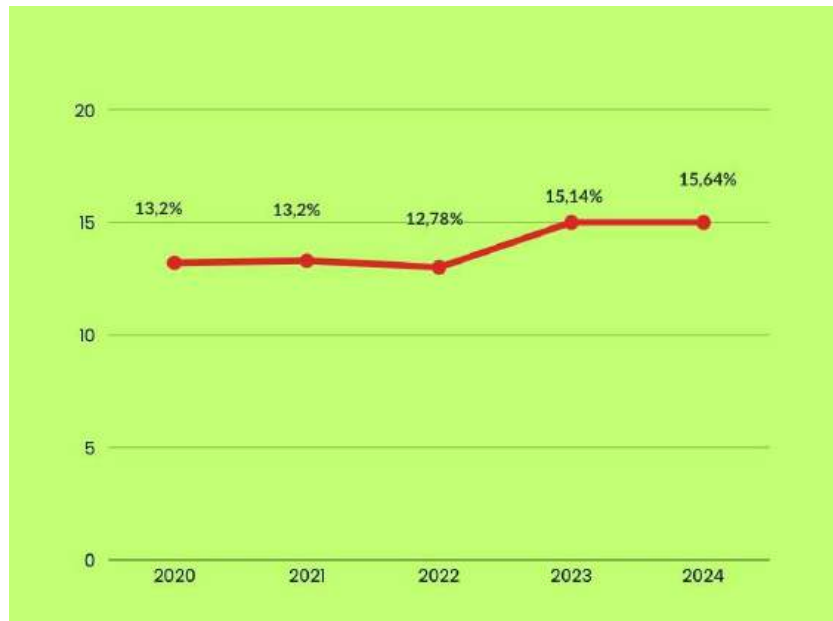
Tahun 2024 Dinas P3APPKB mencapai nilai dan predikat CC, menurun apabila dibandingkan tahun 2023 yaitu BB. Hal ini dikarenakan adanya perubahan format penilaian SAKIP Tahun 2024.

5. Total Fertility Rate

Total Fertility Rate (TFR) dihitung dengan tujuan untuk mengukur angka kelahiran total di suatu wilayah. Capaian TFR dari tahun 2020 hingga 2024 bervariasi, yakni secara berurutan 1,47 (Tahun 2020); 1,39 (Tahun 2021); 1,27 (Tahun 2022); 1,99 (Tahun 2023) dan di Tahun 2024 sebesar 2,01. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Blitar sudah menyadari dan mengimplementasikan memiliki 2 (dua) anak untuk mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

6. Rasio Akseptor KB

Rasio Akseptor KB merupakan perbandingan antara jumlah pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan alat atau metode kontrasepsi (akseptor KB) dengan jumlah seluruh PUS dalam suatu populasi, biasanya dinyatakan dalam persen. Capaian Akseptor KB Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 disajikan pada gambar 2.6 sebagai berikut.



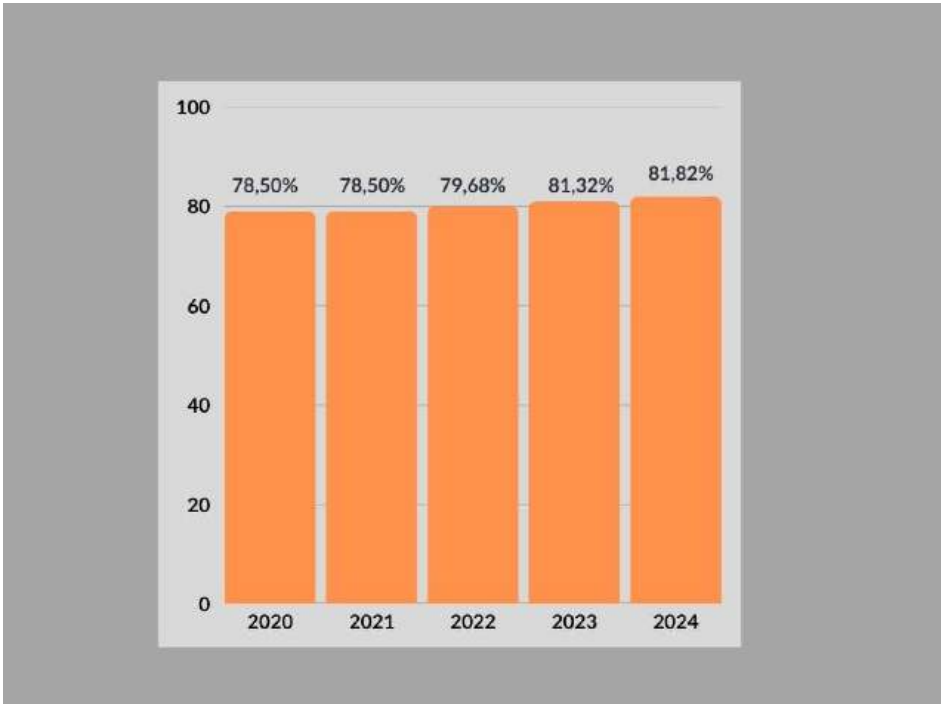
Gambar 2.6 Grafik Rasio Akseptor KB

(Sumber : Dinas P3AP2KB Kabupaten Blitar, 2025)

Berdasarkan gambar 2.6 diatas menunjukkan capaian Rasio akseptor KB tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan. Rasio akseptor KB menggambarkan perbandingan jumlah pasangan usia subur yang menggunakan kontrasepsi dengan jumlah pasangan usia subur dalam suatu populasi. Capaian Rasio akseptor KB sebesar terus mengalami peningkatan hingga Tahun 2024 menjadi 15,64. Capaian Rasio akseptor KB telah melebihi target kinerja (14,17%) yang dapat disimpulakn bahwa telah suksesnya program keluarga berencana dan pengendalian penduduk di Kabupaten Blitar. Namun, tetap perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas dari tenaga Penyuluh KB untuk melakukan konsultasi, edukasi dan informasi kepada pasangan usia subur (PUS).

7. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator mengukur tingkat partisipasi dan peran gender dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Capaian IDG dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 disajikan pada gambar 2.7 sebagai berikut.



Gambar 2.7 Grafik Indeks Pemberdayaan Gender

Sumber : Dinas P3AP2KB Kabupaten Blitar, 2025)

Sesuai gambar 2.7 diatas menunjukkan IDG di Kabupaten Blitar pada tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan yakni, tahun 2020 mencapai 78,50%, tahun 2021 di angka 78,50, pada tahun 2022 mencapai angka 79,68, tahun 2023 di angka 81,32 dan tahun 2024 mencapai angka 81,82. Angka ini menunjukkan bahwa Kabupaten Blitar sudah memiliki tingkat pemberdayaan gender cukup baik yakni adanya perbaikan dan kemajuan dalam upaya pemberdayaan gender di wilayah tersebut. Peningkatan ini disebabkan oleh berbagai inisiatif dan program yang dirancang untuk meningkatkan kesetaraan gender, termasuk peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan, kesempatan kerja, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

8. Persentase Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Partisipasi perempuan dalam pembangunan di lembaga pemerintah bertujuan untuk mengetahui apakah pembangunan di lembaga pemerintah yang dilakukan telah berspektif gender. Cara untuk menghitung capaian partisipasi perempuan di lembaga pemerintah yaitu jumlah perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah dibagi dengan jumlah pekerja perempuan dikali 100%. Capaian partisipasi perempuan di lembaga pemerintah pada Tahun 2020 hingga 2024 bervariasi. Pada Tahun 2020 mencapai 2,67%, kemudian Tahun 2021 capaian partisipasi perempuan lembaga pemerintah sebesar 2,66% lalu mengalami penurunan di tahun 2022 sebesar 2,17%. Selanjutnya, mengalami peningkatan di tahun 2023 sebesar 4,18% dan di tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 3,75%. Perempuan cenderung membawa gaya kepemimpinan yang lebih inklusif, kolaboratif, dan berorientasi pada kemanusiaan. Kehadiran mereka di posisi strategis tidak hanya

memperkaya dinamika tim, tetapi juga memastikan kebijakan yang dihasilkan lebih sensitif gender dan holistik, sehingga benar-benar menjawab kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Dengan meningkatnya jumlah perempuan di lembaga pemerintah, membuka pintu bagi perspektif, pengalaman, dan pendekatan pemecahan masalah yang lebih beraga.

9. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Capaian persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta dihitung dengan menjumlahkan perempuan yang bekerja di lembaga swasta dibagi dengan jumlah pekerja perempuan dikali 100%. Tujuan partisipasi perempuan dalam pembangunan di lembaga swasta yaitu untuk mengetahui keterlibatan perempuan di lembaga swasta.

Berdasarkan data, tingkat partisipasi perempuan untuk bekerja di lembaga swasta di Kabupaten Blitar Tahun 2020 sebesar 22,90, lalu Tahun 2021 sebesar 23,74% namun pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 19,74% dikarenakan adanya kasus pandemi yang menyebabkan keterlibatan perempuan di lembaga swasta menurun. Selanjutnya, pada tahun 2023 mulai meningkat menjadi 27,31% dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 31,05%. Oleh karena itu, tantangan ini harus disambut positif oleh Pemerintah Kabupaten Blitar melalui perluasan lapangan usaha.

10. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif

Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif di Kabupaten Blitar pada tahun 2020 sampai dengan 2024 yaitu 100% sehingga dapat dikatakan sangat baik. Hal ini mencerminkan bahwa dengan adanya sosialisasi yang terus menerus tentang keberadaan Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Blitar sebagai lembaga yang membantu menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Capaian kinerja rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk) Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 12,44. Peningkatan penanganan kasus ini disebabkan meningkatnya kasus TPPO yang langsung memakan 30 korban, dimana 24 diantaranya merupakan orang luar daerah Kabupaten Blitar meliputi NTT sebanyak 19 orang, Jember 1 Orang, Banyuwangi 2 Orang, Jakarta Utara 1 Orang dan Sulawesi Utara 1 Orang dan Kabupaten Blitar 6 Orang. Kasus ini juga mendapatkan penanganan dari berbagai pihak diantaranya Satgas TPPO Provinsi Jawa Timur (UPT PPA Provinsi Jawa Timur), Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Kepolisian Daerah Jawa Timur, Dinas Sosial Kabupaten Blitar dan Juga Polres Blitar. Peran UPT PPA Kabupaten Blitar dalam kasus ini berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Blitar untuk dapat menyediakan tempat tinggal sementara berikut hingga kebutuhan

pribadi hingga para korban dapat kembali ke daerah asal.

11. Cakupan Keluarga Berkualitas yang Memenuhi Kriteria Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak

Cakupan Keluarga Berkualitas yang Memenuhi Kriteria Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak merupakan persentase keluarga berkualitas yang memenuhi kriteria kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak mencakup beberapa dimensi utama yang saling terhubung. Dimensi-dimensi ini memastikan adanya keseimbangan hak dan tanggung jawab, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak secara optimal.

Capaian indikator Cakupan Keluarga Berkualitas yang Memenuhi Kriteria Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar meskipun capaiannya masih rendah, namun terus mengalami peningkatan dari Tahun 2020 hingga 2024 yaitu 25,35% (Tahun 2020); 28,20% (Tahun 2021); 30,05% (Tahun 2022); 31,03% (Tahun 2023) dan mengalami peningkatan sebesar 31,42% (Tahun 2024). Peningkatan cakupan Keluarga Berkualitas yang memenuhi kriteria kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak menunjukkan peningkatan kesejahteraan keluarga dan terwujudnya lingkungan yang harmonis. Kondisi ini juga mencerminkan keberhasilan berbagai program pemerintah dalam memberdayakan keluarga dan masyarakat.

12. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif

Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif 2020 hingga tahun 2024 telah tercapai 100%. Demikian dengan capaian persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait juga telah ditangani 100% mulai Tahun 2020 hingga 2024. Hal tersebut menunjukkan komitmen Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar bahwa setiap pengaduan dilayani dan diselesaikan sampai tuntas.

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan indeks yang menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. Data Kementerian PPA menyebutkan IPA di Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar Tahun 2023 sebesar 67,77. Meskipun belum sempurna, skor ini menunjukkan adanya komitmen dan upaya yang baik dari pemerintah dalam melaksanakan perlindungan anak. Upaya ini mencakup berbagai dimensi, seperti pembentukan kebijakan, ketersediaan layanan, dan koordinasi antar lembaga.

13. Median Usia Kawin Pertama (MUKP)

Keberhasilan Program Pengendalian Penduduk pada Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar diukur menggunakan indikator Median Usia Kawin Pertama (MUKP) perempuan. Capaian MUKP Tahun 2024 ditargetkan berada pada usia 20,60 tahun dan dapat tercapai di usia 22

Tahun yang menandakan bahwa perkawinan pertama perempuan di Kabupaten Blitar sudah memasuki usia yang ideal. Hal ini sejalan dengan anjuran Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bahwa usia ideal untuk menikah, pada perempuan 21 tahun dan usia 25 tahun untuk laki laki.

Pemerintah Kabupaten Blitar menyelenggarakan Program Pembinaan Keluarga Berencana sebagai upaya pengendalian penduduk yang bertujuan untuk memberikan pelayanan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi yang dapat diberikan secara gratis kepada Pasangan Usia Subur (PUS). Indikator program yang pertama yaitu *Age Specific Fertility Rate (ASFR)* merupakan jumlah kelahiran hidup dalam setahun per 1.000 perempuan pada kelompok umur tertentu. Capaian ASFR telah mengalami penurunan, pada tahun 2024 angka kelahiran perempuan usia 15-19 tahun Kabupaten Blitar mencapai sebesar 18,7. Hal ini menunjukkan kondisi yang cukup baik untuk menekan angka kelahiran pada usia remaja dan kejadian balita stunting di Kabupaten Blitar.

Indikator yang kedua yakni *unmetneed* merupakan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi. Capaian kinerja *unmetneed* secara berurutan sejak Tahun 2020 hingga 2024 sebesar 8,51% (Tahun 2020); 7,99% (Tahun 2021); 16,82% (Tahun 2022); 15,86% (Tahun 2023) dan turun pada Tahun 2024 sebesar 8,6%. Keberhasilan capaian *unmetneed* ini menunjukkan upaya perwujudan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan upaya pengendalian penduduk untuk berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pelayanan Keluarga Berencana Berkualitas merupakan pelayanan KB sesuai standart dengan menghormati hak individu dalam merencanakan kehamilan. Keluarga Berencana dapat meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan Norma Keluarga Kecil, Bahagia, dan Sejahtera yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk.

14. Indeks Pembangunan Keluarga (i-BANGGA/IPK)

Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) merupakan indeks pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui tiga dimensi yaitu ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Tujuan pengukuran Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga dan mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan. Adapun kriteria IPK adalah nilai dibawah 40 masuk kategori “kurang baik” atau keluarga rentan, nilai 40-70 masuk kategori “cukup baik” atau Keluarga Berkembang, dan nilai diatas 70 masuk kategori “baik” atau Keluarga Tangguh. Capaian IPK

disajikan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dikarenakan di tahun 2020 belum ada penilaian IPK, untuk lebih jelasnya capaian IPK akan disajikan pada gambar 2.8 sebagai berikut.



Gambar 2.8 Grafik Indeks Pembangunan Keluarga

(Sumber : Dinas P3AP2KB Kabupaten Blitar, 2025)

Berdasarkan gambar 2.8 diatas menunjukkan capaian IPK berturut-turut dari Tahun 2021 sebesar 56,1, tahun 2022 sebesar 57,28, Tahun 2023 naik menjadi 61,15 dan pada Tahun 2024 sebesar 62,0 dapat diartikan bahwa keluarga di Kabupaten Blitar merupakan keluarga yang berkembang atau masuk kategori cukup baik. Capaian IPK meningkat sebesar 0,85 dibanding tahun 2023 yaitu 61,15 yang artinya upaya pembangunan kualitas keluarga di Kabupaten Blitar semakin meningkat.

2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi kinerja pelayanan Dinas P3APPKB mendapatkan dukungan penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Dalam melaksanakan pelayanan pada tahun 2021-2024 Dinas P3APPKB menjalankan 10 program kegiatan dengan rata-rata rasio penyerapan anggaran mengalami peningkatan, tahun 2021 telah tercapai 80,59%, tahun 2022 meningkat menjadi 81,35%, tahun 2022 meningkat kembali menjadi 88,75% dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 89,02%. Anggaran dan realisasi anggaran Dinas P3APPKB lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2021 s.d 2024

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	426.935.775,00	4.036.047.871,00	3.883.008.163,00	4.396.706.058,00	383.889.272,00	3.888.524.254,00	3.687.334.902,00	4.007.439.188,00	89,92	96,34	94,96	91,15	2,85	3,05
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	130.015.000,00	414.039.850,00	361.041.909,00	824.053.672,00	129.426.000,00	363.542.232,00	315.391.950,00	805.359.666,65	99,55	87,80	87,36	97,73	1,11	1,08
3	Program Perlindungan Perempuan	321.705.950,00	208.202.300,00	137.878.515,00	540.489.641,00	189.069.600,00	122.089.688,00	75.299.977,00	400.497.678,00	58,77	58,64	54,61	74,10	0,74	1,19
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	48.223.200,00	68.050.000,00	46.396.500,00	17.244.961,00	42.477.750,00	66.829.000,00	45.493.875,00	14.804.000,00	88,09	98,21	98,05	85,85	-0,18	-0,14
5	Program Pengelolaan Data Gender dan Anak	1.276.750,00	63.461.150,00	28.188.000,00	27.496.939,00	1.276.750,00	62.743.150,00	27.016.800,00	27.098.600,00	100,00	98,87	95,85	98,55	16,04	15,86
6	Program Pemenuhan Hak Anak	25.115.335,00	66.643.000,00	169.833.269,00	356.839.114,00	22.236.150,00	63.865.400,00	164.574.875,00	329.974.660,00	88,54	95,83	96,90	92,47	1,43	1,48

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
7	Program Perlindungan Khusus Anak	336.203.100,00	414.999.950,00	179.408.490,00	278.666.974,00	102.127.070,00	272.522.667,00	146.761.625,00	234.786.134,00	30,38	65,67	81,80	84,25	0,07	0,60
8	Program Pengendalian Penduduk	218.170.400,00	242.129.950,00	477.677.500,00	594.350.141,00	214.485.900,00	197.971.004,00	418.575.630,00	548.477.809,00	98,31	81,76	87,63	92,28	0,44	0,45
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana	8.327.960.000,00	6.731.761.000,00	6.554.093.000,00	6.978.812.000,00	5.184.935.690,00	5.587.834.220,00	5.945.578.374,00	6.047.017.640,00	62,26	83,01	90,72	86,65	-0,05	0,05
10	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	222.787.330,00	4.570.572.330,00	6.317.240.004,00	6.220.900.000,00	221.415.400,00	2.165.449.895,00	6.295.990.000,00	5.460.178.300,00	99,38	47,38	99,66	87,77	6,63	3,52
Jumlah		10.058.392.840	16.815.907.401	18.154.765.350	20.235.559.500	6.491.339.582	12.791.371.510	17.122.018.008	17.875.633.676	80,59	81,35	88,75	89,08	2,91	2,72

(Sumber : Dinas P3AP2KB Kabupaten Blitar, 2025)

2.1.5 Kelompok Sasaran Pelayanan

Kelompok sasaran layanan merupakan pihak atau kelompok masyarakat yang menjadi target atau penerima manfaat utama dari suatu program, kegiatan, atau layanan yang diselenggarakan oleh Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar. Kelompok sasaran pelayanan dipilih berdasarkan kebutuhan, karakteristik, dan tujuan dari pelayanan yang diberikan. Dengan menetapkan kelompok sasaran secara tepat, maka pelayanan bisa lebih efektif, efisien, dan berdampak. Kelompok sasaran Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar, antara lain:

1. Internal pegawai di lingkup Dinas DP3APPKB Kabupaten Blitar yang terdiri dari seluruh ASN dan Tenaga Harian Lepas;
2. Masyarakat sebagai kelompok sasaran penerima manfaat, antara lain:
 - a) Peningkatan ekonomi keluarga dengan sasaran penerima manfaat perempuan kepala keluarga dan perempuan penyintas kekerasan.
 - b) Pemenuhan hak anak dengan sasaran penerima manfaat anak yang mengajukan dispensasi nikah.
 - c) Penyediaan layanan perlindungan perempuan dan anak dengan sasaran penerima manfaat, antara lain: perempuan dan anak korban kekerasan.
 - d) Promosi dan konseling Program Bangga Kencana dengan kelompok sasaran Akseptor KB dan pasangan usia subur dalam pelayanan KIE.
 - e) Pemberdayaan masyarakat dengan sasaran penerima manfaat, antara lain: keluarga BKB, remaja dan keluarga BKR dan lansia beserta keluarga BKL.

2.1.6 Mitra Kerjasama

Dalam rangka menunjang pencapaian tujuan dan sasaran strategis, Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar menjalin kerjasama dengan mitra perangkat daerah. Adapun mitra perangkat daerah Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar, antara lain:

1. Mitra kerja internal dalam pemberian layanan P3APPKB Kabupaten Blitar, meliputi:
 - a) Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)
 - b) Kader Institusi Masyarakat Pendesaan (IMP)
 - c) Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK)
 - d) Komunitas Generasi Remaja (GenRe), Forum Anak, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)
2. Mitra kerja eksternal dalam mendukung pemberian layanan P3APPKB Kabupaten Blitar, meliputi:
 - a) Bappeda Litbang dalam rangka perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kegiatan di Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar.
 - b) Inspektorat dalam rangka pengawasan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.
 - c) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka pemenuhan data kependudukan.
 - d) Dinas Kesehatan dalam rangka koordinasi data kesehatan.
 - e) Rumah Sakit Umum Daerah Wlingi dan Rumah Sakit Umum Daerah Srengat dalam rangka pelayanan kontrasepsi MOW dan MOP.
 - f) Kepolisian Resort Kabupaten Blitar
 - g) Kejaksaan Negeri

- h) Pengadilan Agama
- i) Pengadilan Negara
- j) Kantor Kementerian Agama
- k) Lembaga Pembinaan Khusus Anak
- l) Balai pemasyarakatan

2.1.7 Dukungan BUMD

Badan Usaha Milik Negara yang dikelola oleh Pemerintah Daerah disebut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dinas Peternakan dan Perikanan sejak di tetapkannya belum terdapat dukungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pencapaian kinerja.

2.1.8 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Kerjasama Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar, adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerjasama antara Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar dan Biro Konsultasi Hukum dan Psikolog Klinis dengan Nomor: B/411/2/409.17.6/PKS/2025 dan Nomor : 001/BKH.SS/PKS/I/2025.
2. Perjanjian Kerjasama antara Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar dengan Klinik Swasta dengan Nomor: B/476/953/409.17.5/2024 dan Nomor : 073/KUAN.SP/VII/2024.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

Rumusan masalah merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita atau capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Permasalahan dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan lingkungan strategis, adalah sebagai berikut:

1. Telaah RPJMD Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil telaah RPJMD Tahun 2025-2029 menyebutkan masih rendahnya akses dan kualitas perlindungan sosial, antara lain: adanya kesenjangan gender dan kurang optimalnya pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak.

2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam RT/RW tidak diatur mengenai rencana struktur tata ruang, struktur tata ruang saat ini, rencana pola ruang, pola ruang saat ini, dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang.

3. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penetapan isu strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS)

Kabupaten Blitar Tahun 2025-2049 didasarkan pada hasil Konsultasi Publik KLHS RPJMD serta keterkaitan isu terhadap kondisi lingkungan hidup, capaian data Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan isu strategis dokumen perencanaan lainnya. Terkait dengan Telaahan KLHS, rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tidak berimplikasi langsung terhadap lingkungan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang berkaitan dengan Dinas P3APKB Kabupaten Blitar sebagai berikut :

1. Kesetaraan Gender dengan tujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
2. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk Pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.

Sedangkan dalam 6 (enam) Isu Strategis terkait dengan KLHS RPJMD 2025-2029 di Kabupaten Blitar, Dinas P3APKB bertanggungjawab terhadap isu keberpihakan terhadap perlindungan perempuan perempuan dan anak serta pemberdayaan perempuan dengan sasaran menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, optimalisasi pemberdayaan perempuan, serta tercapainya kesetaraan dan keadilan gender. Alternatif skenario strategi dan arah kebijakan, antara lain:

1. Menurunnya Angka Prevalensi kekerasan terhadap anak dan perempuan,
2. Meningkatnya Proporsi Perempuan yang berada di posisi managerial guna memberikan kesempatan bagi Perempuan dalam pengambilan keputusan.

Dengan skenario strategi dan arah kebijakan tersebut hasil yang diharapkan (*outcome*) adalah terwujudnya perlindungan anak dan perempuan berbasis masyarakat serta terciptanya pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan.

4. Telaahan Renstra K/L

Dalam rangka mewujudkan Indonesia yang lebih berkeadilan dan sejahtera bagi seluruh perempuan dan anak. Kementerian PPA Republik Indonesia menyusun arah kebijakan berdasarkan isu-isu strategis yang muncul sebagai respons terhadap berbagai tantangan dan permasalahan terkini yang dihadapi perempuan dan anak di Indonesia, di antaranya:

- a) Kesenjangan gender yang masih ada dan belum tertangani dengan optimal, termasuk dalam isu keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan.

- b) Peningkatan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang terus dilaporkan. Kementerian PPA Republik Indonesia mencatat adanya lonjakan laporan kasus kekerasan pada Tahun 2025 yang paling banyak terjadi di dalam rumah tangga. Kekerasan seksual menjadi jenis kasus yang paling sering dilaporkan.
- c) Kasus kekerasan seksual pada anak di satuan pendidikan yang terus menjadi sorotan, menimbulkan trauma mendalam bagi para korban.
- d) Kurang optimalnya penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, serta masyarakat untuk mengatasi tantangan yang kompleks ini.

Penetapan isu-isu strategis Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, berdasarkan hasil evaluasi pencapaian program Tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut:

- a) Angka Kelahiran Total (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) yang menurun terlalu cepat di bawah 2.1 akan berdampak pada peningkatan secara drastis proporsi penduduk lansia dan berpotensi menjadi negara dengan pertumbuhan negatif.

- b) *Age Specific Fertility Rate (ASFR)* dan Median Usia Kawin Pertama (MUKP)

Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun atau sering disebut sebagai fertilitas remaja dan Median Usia Kawin Pertama (MUKP) merupakan indikator Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang *penting*. Dua indikator ini menggambarkan sehat atau tidaknya kondisi kehidupan reproduksi perempuan. Para ibu yang masih berusia muda atau masih remaja menghadapi risiko kematian terkait kehamilan, komplikasi persalinan, dan kelahiran prematur atau berat badan lahir rendah yang paling tinggi. Kehamilan dan kelahiran pada saat masih remaja juga mempunyai dampak sosial dan ekonomi yang penting, yang paling banyak dipublikasikan adalah hilangnya kesempatan pendidikan ketika kehamilan memaksa perempuan muda untuk meninggalkan sekolah. Karena berbagai dampak buruk tersebut maka fertilitas remaja dan perkawinan usia muda (di bawah 18 tahun) akan terus diupayakan untuk diturunkan.

- c) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (m-CPR)

Pada tahun 2023, proporsi kebutuhan Keluarga Berencana (KB) yang terpenuhi menurut alat atau cara KB modern di Indonesia telah tercapai 83.20%, kondisi ini menggambarkan masih belum optimalnya pemenuhan kebutuhan Keluarga Berencana (KB) menurut alat/cara KB modern kepada Pasangan Usia Subur (PUS), sehingga ke depan masih diperlukan intervensi akses dan kualitas program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang

lebih komprehensif, sesuai segmen, dan memastikan pemenuhan sampai ke tingkatan wilayah.

d) Persentase Kebutuhan ber-Kb yang Tidak Terpenuhi

Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi pada Pasangan Usia Subur (PUS) atau unmet need Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu indikator utama Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Tahun 2020-2024 yang belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, walaupun mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, tingkat *unmetneed* Keluarga Berencana (KB) masih sekitar 11.1% jauh di atas target yang ditetapkan yaitu 7.7%.

Angka *unmetneed*) ini menjadi perhatian serius karena dampak yang dihasilkan sungguh berpengaruh pada kesehatan reproduksi perempuan. *Unmetneed* yang tinggi bisa menyebabkan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan yang bisa membahayakan kesehatan ibu maupun bayinya. *Unmetneed* yang tinggi juga menggambarkan kualitas pelayanan KB yang masih rendah karena belum bisa memenuhi harapan semua perempuan atau pasangan usia subur yang menginginkan untuk membatasi atau menjarangkan kelahirannya.

e) Persentase KB Aktif Modern Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Pada tahun 2024 capaian persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dikategorikan cukup terhadap target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Angka yang dicapai adalah 89,82%. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga akan terus berupaya meningkatkan persentase pemakaian metode jangka panjang ini sehingga komposisi pemakaian metode kontrasepsi di Indonesia terus mengalami perbaikan ke arah yang makin ideal.

f) Persentase Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi

Pada tahun 2024 capaian persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (*dropout/DO*) telah mendekati 100% dari target yang diharapkan atau status capaian hijau (tercapai/berkelanjutan). Namun jika dilihat dari angka absolutnya, persentase *drop out* masih tinggi yaitu sekitar 20%. Target pada tahun mendatang akan terus diturunkan angkanya.

5. Telaah Hasil Penjaringan Aspirasi yang Dilakukan Oleh Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan secara rinci yang dihadapi oleh Dinas P3APKB Kabupaten Blitar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang meliputi tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Permasalahan hasil penjangkauan aspirasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, antara lain:

- a) Masih rendahnya peran serta perempuan dalam pembangunan, dimana masih rendahnya keterlibatan perempuan di lembaga pemerintah, lembaga swasta dan dunia usaha. Selain itu, capaian kinerja Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar terkait penganggaran yang responsif gender pada APBD masih perlu ditingkatkan.
- b) Munculnya berbagai tindak kekerasan pada perempuan dengan ditemukannya jumlah kasus KDRT, perempuan banyak menjadi objek pornografi serta perdagangan manusia.
- c) Terjadinya praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti: perkawinan anak dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).
- d) Tingginya prevalensi stunting yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius. Untuk itu, diperlukan upaya evaluasi efektivitas program yang sudah berjalan dan merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran guna mencapai target penurunan stunting yang berkelanjutan.

Pembangunan nasional yang berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari peran penting perempuan, anak, serta pengendalian pertumbuhan penduduk yang seimbang. Dalam konteks ini, Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar memiliki mandat strategis dalam mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan penguatan kualitas keluarga sebagai fondasi masyarakat.

Namun demikian, hingga saat ini masih terdapat sejumlah isu strategis yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DP3APPKB Kabupaten Blitar, diantaranya kesenjangan gender masih menjadi permasalahan dengan adanya perbedaan perlakuan, kesempatan, dan akses antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, politik, kesehatan, serta hak sosial dan ekonomi. Di bidang pendidikan, meskipun akses bagi perempuan semakin membaik, di beberapa daerah tertinggal dan pedesaan masih terdapat anggapan bahwa pendidikan untuk anak laki-laki lebih penting dibandingkan anak perempuan. Di sektor ketenagakerjaan, perempuan sering kali menghadapi diskriminasi dalam hal upah, posisi kepemimpinan, dan kesempatan promosi. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, perempuan kerap menjadi korban kekerasan berbasis gender yang sering kali tidak mendapatkan perlindungan atau keadilan yang semestinya.

Upaya perlindungan anak telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih marak terjadi. Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak tidak hanya memerlukan landasan hukum yang kuat, tetapi juga implementasi yang efektif di berbagai tingkatan. Pendidikan dan penyuluhan tentang hak-hak anak, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan melindungi anak sangat diperlukan agar hak-hak anak dapat

terpenuhi secara menyeluruh. Untuk lebih jelasnya berikut akan disajikan beberapa penetapan isu strategis Dinas P3APKB Kabupaten Blitar guna meningkatkan kualitas layanan akan disajikan pada tabel 2.4 sebagai berikut.

Tabel 2.4
Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional/provinsi	
1	BPS (2024) menyebutkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di Kabupaten Blitar sebesar 23%	Belum optimalnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum Perempuan	Rendahnya keterlibatan perempuan di bidang politik, pendidikan dan ekonomi	Dengan mewujudkan kesetaraan gender, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan, keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah dan swasta	Pemberdayaan perempuan di bidang politik, pendidikan dan ekonomi
2	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk) pada tahun 2024 di Kabupaten Blitar sebesar 12,44	Adanya kasus kekerasan terhadap Perempuan, TPPO dan belum optimalnya Perlindungan Perempuan	Menciptakan kondisi sosial yang aman untuk perempuan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan stabilitas lingkungan	Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah masalah global yang kompleks dan memerlukan solusi yang komprehensif	Diterbitkannya Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) Tahun 2024 untuk mendukung pencapaian RPMJD yaitu peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda.	Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Blitar sebanyak 89 orang (2024) dengan jenis kasus terbanyak yaitu TPPO	Meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO, meliputi: pencegahan, intervensi, pemulihan dan penyembuhan. dengan melibatkan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.
3	Kasus Kekerasan Terhadap Anak (per 100.000 anak) pada tahun 2024 di Kabupaten Blitar sebesar 29,95	Belum optimalnya Pemenuhan Hak Anak dan tingginya kasus kekerasan terhadap Anak serta Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH),	Menjamin perlindungan terhadap anak	Konvensi hak anak merupakan komitmen untuk mengakui pentingnya partisipasi anak dalam keputusan yang memengaruhi hidup mereka dan memberikan perlindungan terhadap berbagai bentuk	Diterbitkannya Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) Tahun 2024 untuk mendukung pencapaian RPMJD yaitu peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda.	Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Blitar sebanyak 61 orang (2024), dimana kasus kekerasan yang mendominasi kasus bullying	Penanganan kekerasan terhadap anak melibatkan pendekatan multi-sektor yang mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi. Upaya ini memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah.

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional/provinsi	
		penelantaran anak dan adanya pernikahan anak		eksploitasi dan kekerasan			
4	Adanya pengajuan rekomendasi pernikahan pada anak	Kurangnya optimalisasi kesertaan KB	Menurunnya angka kelahiran pada perempuan usia 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	Permasalahan ASFR remaja merupakan isu penting yang perlu terus ditangani agar kualitas hidup generasi muda dapat ditingkatkan.	Arah kebijakan BKKBN dalam pembangunan kependudukan 2045 yaitu mempertahankan tingkat kelahiran pada angka replacement level secara nasional	Tingginya angka kelahiran remaja (ASFR) di Kabupaten Blitar akan mengakibatkan meningkatnya kelahiran pada remaja dan menyumbang prevalensi stunting	Mengoptimalkan pendekatan dan kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan adanya kolaborasi berbagai pihak dalam rangka menurunkan prevalensi stunting.

(Sumber : Dinas P3AP2KB Kabupaten Blitar, 2025)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam mewujudkan visi Kepala Daerah Kabupaten Blitar yaitu **“KABUPATEN BLITAR BERDAYA DAN BERJAYA”**, selanjutnya Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan, menyusun dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Selaras dengan tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar, maka Dinas P3APPKB menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah untuk mendukung pencapaian kinerja Misi I RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu **“MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG INKLUSIF, BERAKHLAK, SEHAT JASMANI DAN ROHANI, BERPENDIDIKAN YANG BAIK, BERDAYA SAING, MELALUI PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA DAN OPTIMALISASI POTENSI GENERASI MUDA YANG SIAP MENYONGSONG INDONESIA EMAS”**. Adapun sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 yang akan dilaksanakan Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar yakni sasaran ke 3 (tiga) yang berbunyi: Meningkatnya Kesetaraan Gender.

3.1. Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut diatas, Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar sesuai dengan tugas fungsi yang tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2022 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu: **“Meningkatnya Kualitas Pembangunan Gender Dan Anak Serta Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk”** dengan indikator tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Gender dan Anak, dan;
2. Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk

3.2 Sasaran

Sasaran strategis (SS) merupakan penjabaran dari tujuan yang lebih operasional, konkrit, terukur dan berbasis waktu. Sasaran strategis dilengkapi dengan Indikator Kinerja yang *relevan* dan *reliable*. Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, berdasarkan analisis permasalahan dan isu strategis serta lingkungan dinamis yang mempengaruhi, maka ditetapkan sasaran Dinas P3APPKB sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dengan indikator kinerja Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dan Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk).
2. Meningkatnya Perlindungan Anak dengan indikator kinerja Indeks Perlindungan Anak (IPA).

3. Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Keluarga.
4. Meningkatnya Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah.

Sistem kinerja pemerintah perlu akuntabel dan terukur, sehingga dibutuhkan sebuah sistem untuk menjabarkan sasaran-sasaran besar menjadi target-target yang lebih spesifik di setiap tingkatan. Dalam konteks manajemen kinerja, Cascading adalah proses penjabaran sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan target kinerja dari tingkat organisasi yang lebih tinggi ke tingkat unit atau individu di bawahnya. Proses ini memastikan bahwa semua unit dan pegawai memiliki pemahaman yang sama dan bergerak ke arah yang selaras untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan.

Cascading pada Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar disusun bertujuan untuk penyelarasan rencana dan program kerja di berbagai level, mulai dari visi kepala daerah hingga kinerja staf pelaksana, untuk mencapai tujuan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara efektif. Proses ini memastikan setiap unit kerja dan individu di Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar berkontribusi terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan. Cascading ditindaklanjuti berdasarkan amanat Misi ke I Bupati dan Wakil Bupati yakni: “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Inklusif, Berakhlak, Sehat Jasmani Dan Rohani, Berpendidikan Yang Baik, Berdaya Saing, Melalui Pembangunan Keluarga Sejahtera Dan Optimalisasi Potensi Generasi Muda Yang Siap Menyongsong Indonesia Emas”. Selanjutnya, misi tersebut di terjemahkan ke dalam Tujuan dan Sasaran Perangkat daerah yang lebih spesifik yakni: “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Gender Dan Anak Serta Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk” sebagai arah untuk menentukan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar yang akan dilaksanakan periode Tahun 2025-2029. Untuk lebih jelasnya penjabaran Cascading Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar akan disajikan pada gambar 3.1 sebagai berikut.

KINERJA MANAJERIAL	SASARAN PROGRAM										PK KEPALA BIDANG
	Meningkatnya kinerja pelayanan kesekretariatan untuk mendukung kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Meningkatnya pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan dan TPPO	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Terjaminnya pemenuhan hak anak secara komprehensif	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Terkendalinya pertumbuhan/pertambahan jumlah penduduk	Meningkatnya efektivitas Program Keluarga Berencana	Meningkatnya keberdayaan dan kesejahteraan keluarga	
	IK: Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	IK: Persentase ARG pada belanja langsung APBD' Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK)	IK: Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehe	IK: Persentase keluarga yang Menerima Layanan Komprehensif bagi keluarga	IK: Tingkat pemanfaatan data gender terpilah	IK: Indeks Pemenuhan Hak Anak	IK: Persentase anak korban kekerasan yang ditangani secara komprehensif	IK: ASFR	IK: Unmetneed Persentase m-CPR	IK: Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	

	KINERJA	SASARAN KEGIATAN											PK	
	MANAJERIAL	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	ESELON IV/JF
		Persentase SKPD yang menyusun dokumen PPRG untuk seluruh kegiatan strategis (sesuai RAT)	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/ Kota yang Tersedia	Persentase lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/ kota yang telah melembagakan PHA	Persentase kasus kekerasan anak yang terlayani oleh instansi tingkat kabupaten/ kota	Jumlah Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terpadu dan sinkron dengan Kebijakan Pemerintah Provinsi	Jumlah stakeholder /pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program Bangga Kencana	Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif	Presentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	Perse ntase laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	Perse ntase administrasi umum yang dilaksanakn secara akuntabel	

KINERJA	SASARAN SUB KEGIATAN												PK
MANAJERIAL	Pendampingan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Kab/Kota	Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Penyusunan Dokumen Perencanaan Peran gkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	JF/PELAKSANA
	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Persentase lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota yang telah melembagak an PHA	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah dokumen perencanaan peran gkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	

Keterkaitan tujuan dan sasaran strategis Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar diarahkan untuk mencapai beberapa sasaran beserta indikator sasarannya dengan mempertimbangkan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (RPJMD). Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas DP3APPKB Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 akan disajikan pada tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	NSPK / SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL / REFERENSI SUMBER DATA	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE						KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
INDIKATOR TUJUAN														
1	Meningkatkan kesetaraan gender	Meningkatnya kualitas pembangunan gender dan anak		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	Ukuran untuk mengevaluasi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. IPG mengacu pada capaian pembangunan manusia berbasis gender.	93,65	93,8	93,95	94,1	94,25	94,4	94,4	94,4
2	Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persentase	Angka yang menunjukkan persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah atau negara dalam jangka waktu tertentu	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

NO	NSPK / SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL / REFERENSI SUMBER DATA	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE						KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
INDIKATOR SASARAN														
1	Meningkatkan kesetaraan gender	Meningkatnya kualitas pembangunan gender dan anak	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	Ukuran untuk menilai kesetaraan gender dalam partisipasi ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan	0,263	0,260	0,257	0,254	0,251	0,248	0,245	0,245
2				Ratio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk)	Rasio	Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kekerasan terhadap perempuan, termasuk perdagangan orang dalam suatu wilayah.	12,44	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44

NO	NSPK / SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL / REFERENSI SUMBER DATA	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE						KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3			Meningkatnya perlindungan anak	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	Indikator yang menggambarkan pencapaian pembangunan perlindungan anak, khususnya dalam pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus terhadap anak	67,87	67,97	68,07	68,17	68,27	68,37	68,47	68,47
4			Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	Indikator demografi yang digunakan untuk memperkirakan jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita.	62	63,86	65,78	67,75	69,78	71,87	74,03	74,03
5				Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	Hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada perangkat daerah, penilaian dilakukan oleh Inspektorat	50,20 (CC)	60,05 (B)	62,50 (B)	65,00 (B)	70,05 (BB)	72,50 (BB)	80,05 (A)	80,05 (A)

(Sumber : Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar, 2025)

3.3 Strategi

Dalam rangka Untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah serta menjawab isu-isu strategis di Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar, diperlukan strategi dan arah kebijakan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Strategi ini bertujuan sebagai kerangka operasional untuk menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah ke dalam langkah-langkah pelaksanaan kegiatan guna meningkatkan pemberdayaan perempuan, terwujudnya penguatan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Blitar, serta terwujudnya pelaksanaan dan pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana). Untuk lebih jelasnya, identifikasi permasalahan dan isu strategi Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar akan disajikan pada tabel 3.2 sebagai berikut.

Tabel 3.2
Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

No	Permasalahan	Isu-isu Strategis
1	Belum optimalnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan, keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah dan swasta
2	Adanya kasus kekerasan terhadap Perempuan, TPPO dan belum optimalnya Perlindungan Perempuan	Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Blitar sebanyak 89 orang (2024) dengan jenis kasus terbanyak yaitu TPPO
3	Belum optimalnya Pemenuhan Hak Anak dan tingginya kasus kekerasan terhadap Anak serta Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), penelantaran anak dan adanya dan adanya pernikahan anak	Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Blitar sebanyak 61 orang (2024), dimana kasus kekerasan yang mendominasi kasus <i>bullying</i>
4	Rendahnya kesertaan KB Pria dan kesertaan masyarakat dalam kelompok kegiatan Kelompok Bina Keluarga Sejahtera.	Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait kesertaan pria dalam ber-KB dan masih tingginya stigma di masyarakat bahwa kesertaan ber-KB hanya untuk perempuan
5	Masih tingginya Prevalensi Stunting di Kabupaten Blitar	Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat terkait kuantitas dan kualitas makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil dan balita.

(Sumber : Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar, 2025)

3.4 Arah Kebijakan

3.4.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar disusun sebagai upaya sistematis untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan sumber daya manusia dan terwujudnya keluarga yang berkualitas sebagaimana telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan. Dalam rangka menjabarkan tujuan

tersebut menjadi sasaran yang terukur dan dapat diimplementasikan, diperlukan strategi yang tepat dan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika lingkungan, potensi lokal, serta tantangan yang dihadapi. Strategi dan arah kebijakan ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode rencana strategis, agar intervensi yang dilakukan lebih terarah, efektif, dan berdampak nyata terhadap pembangunan daerah. Arah kebijakan Dinas P3APKB Kabupaten Blitar merujuk pada Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana yang disajikan pada tabel 3.3 sebagai berikut ini.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	Meningkatkan keberdayaan dan perlindungan perempuan.	- Menjamin akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan (termasuk kesehatan reproduksi), dan sumber daya ekonomi. - Memperluas kesempatan bagi perempuan dalam kewirausahaan, akses permodalan, serta perlindungan bagi pekerja perempuan di sektor formal maupun informal. - Mendorong keterwakilan perempuan dalam posisi strategis di pemerintahan, politik, dan lembaga publik untuk memastikan kebijakan yang lebih inklusif. - Mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap tahap perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan (Anggaran Responsig Gender). - Memperkuat kerangka hukum dan layanan dukungan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. - Peluncuran inisiatif "Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak" (DRPPA) untuk membangun pengawasan mandiri di tingkat masyarakat.	
2	Meningkatkan keberdayaan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta keluarganya	Memperkuat kolaborasi lintas pemerintah desa untuk meningkatkan Edukasi Peningkatan Kapasitas bagi Bina Keluarga Pekerja Migran Indonesia (BKPMI), yang meliputi pengasuhan jarak jauh (<i>parenting</i>), ketahanan emosi dan komunikasi, serta pengelolaan keuangan dan kewirausahaan.	
3	Pengoptimalan pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak	- Memperkuat gugus tugas KLA melalui koordinasi antar-instansi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat - Melibatkan anak secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan melalui Forum Anak di tingkat desa hingga kabupaten. - Memastikan pengalokasian anggaran yang responsif terhadap kebutuhan dan hak anak di setiap sektor pembangunan.	

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
4	Pencegahan dan penurunan perkawinan di bawah umur	1. Mendorong peran aktif orang tua, keluarga, tokoh agama, dan masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai yang mencegah perkawinan usia anak serta menghapus tradisi yang tidak memihak perlindungan anak. 2. Koordinasi bersama Pengadilan Agama menyusun aturan batas usia menikah (minimal 19 tahun sesuai UU No. 16 Tahun 2019) dan memperketat prosedur pemberian dispensasi kawin. 3. Meningkatkan sinergi antar kementerian (seperti Kementerian PPPA, Kementerian Agama, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) serta pemerintah daerah melalui program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). 4. Melalui Forum Anak Kabupaten Blitar melakukan optimalisasi kapasitas anak dengan meningkatkan informasi dan wawasan agar mereka memiliki kemampuan untuk menolak perkawinan dini serta memahami kesehatan reproduksi.	

(Sumber : Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar, 2025)

Berdasarkan table 3.3 diatas arah kebijakan Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar merujuk pada arah kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029, antara lain: pelatihan untuk peningkatan ekonomi keluarga sesuai potensi wilayah guna mendukung pemberdayaan dan perlindungan perempuan, melaksanakan bimbingan teknis bina keluarga pekerja migran indonesia (PMI) bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan PMI beserta keluarganya, Sosialisasi pemenuhan hak anak dan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual pada anak guna pengoptimalan pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak, sosialisasi pencegahan perkawinan anak bertujuan untuk pencegahan dan penurunan perkawinan di bawah umur serta sosialisasi sekolah orangtua hebat, pelatihan lansia berdaya guna pemberdayaan lansia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan. Arah kebijakan tersebut mengupayakan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup menuju masyarakat mandiri dan sejahtera.

3.4.2 Tahapan Renstra PD

Strategi disusun dengan mempertimbangkan permasalahan, isu-isu strategis dan potensi di Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar sebagaimana telah tersusun dalam dokumen perencanaan. Selanjutnya, tahapan strategi disusun berdasarkan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar dengan

mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Tahapan strategi Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar akan disajikan pada tabel 3.3 sebagai berikut.

Tabel 3.4 Tahapan Strategi Perangkat Daerah

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
- Peningkatkan kualitas hidup perempuan dan mencapai kesetaraan gender yang melibatkan berbagai aspek, baik di bidang ekonomi, politik, sosial dan hukum. - Peningkatan akses layanan perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan. - Terwujudnya pemenuhan hak anak. - Pemutakhiran Pendataan Keluarga dan Verifikasi Validasi Keluarga Resiko Stunting. - Peningkatan dan pemerataan akses penggunaan kontrasepsi modern (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang/MKJP).	- Pembentukan dan penguatan lembaga pemberdayaan perempuan. - Pembentukan dan penguatan lembaga anak. - Pemerataan akses layanan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. - Penyusunan RAD (Rencana Aksi Daerah) Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).	Peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat melalui pembinaan dan pelatihan (Satgas PPA, lembaga perempuan, lembaga anak, BKB, BKL, BKR).	Pemerataan dan penguatan Pemberdayaan dan penguatan kelompok masyarakat (perempuan, anak dan kelompok rentan kelompok rentan) untuk menuju masyarakat yang mandiri.

(Sumber : Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar, 2025)

Tahapan strategi Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar menitikberatkan pada meningkatnya pembangunan manusia. Keseluruhan tahapan strategi tersebut diharapkan dapat mendorong inisiatif dan kemandirian masyarakat dalam merencanakan serta melaksanakan program pembangunan secara partisipatif.

3.4.3 Lokus Renstra Perangkat Daerah

Renstra PD Tahun 2025-2029 Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar, berfokus penyusunan pada lokus atau area fokus utama yang ditetapkan untuk memastikan efektivitas alokasi sumber daya dalam mencapai visi dan misi Bupati Dan Wakil Bupati untuk periode Tahun 2025-2029. Sesuai strategi arah kebijakan yang telah disusun, Renstra PD ini menitikbertakan prioritas lokus spesifik, antara lain:

1. Pemberdayaan perempuan terutama perempuan sebagai kepala keluarga dan kelompok penyintas kekerasan terhadap perempuan.
2. Pencegahan kekerasan terhadap anak dengan pembentukan lembaga layanan.
3. Pemenuhan hak anak, antara lain: sosialisasi pencegahan pernikahan pada anak dan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak (kekerasan pada anak, kasus *bullying*, anak berhadapan dengan hukum (ABH)) dijenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur nonformal dan informal.
4. Pembentukan lembaga forum anak tingkat Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
5. Konvergensi dalam rangka menurunkan prevalensi stunting.

3.4.4 Perangkat Daerah Sebagai Pengampu Standart Pelayanan Minimal

Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan bidang Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar. Oleh karena itu, Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar tidak melaksanakan Standart Pelayanan Minimal (SPM).

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah perlu diubah. Penyusunan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur yang sistematis ditujukan untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan Perangkat daerah dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Rencana Program dan Kegiatan Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar yang akan dilaksanakan selama lima tahun kegiatan diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan administrasi perkantoran
2. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan dengan indikator kinerja persentase anggaran responsif gender (ARG) pada belanja langsung APBD dan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAK).
3. Program Perlindungan Perempuan dengan indikator kinerja persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif.
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan indikator kinerjanya Persentase keluarga yang Menerima Layanan Komprehensif bagi keluarga.
5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak dengan indikator kinerja tingkat pemanfaatan data gender terpilah.
6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan indikator kinerja Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA).
7. Program Perlindungan Khusus Anak dengan indikator kinerja persentase anak korban kekerasan yang ditangani secara komprehensif.
8. Program Pengendalian Penduduk dengan indikator kinerjanya angka kelahiran menurut umur (*Age Specific Fertility Rate/ASFR*).
9. Program Pembinaan Keluarga Berencana dengan indikator kinerja persentase m-CPR dan Unmetneed.
10. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan indikator kinerja Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga.

4.2 Kegiatan

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Dari 10 (sepuluh) program yang telah ditentukan Dinas P3APKB Kabupaten Blitar menjabarkan kegiatan dan sub kegiatan seperti yang disajikan tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya kinerja pelayanan kesekretariatan untuk mendukung kinerja Perangkat Daerah			Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	
					Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
						Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan
1	2	3	4	5	6	7
				Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	Administrasi Umum Perangkat Daerah
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan
1	2	3	4	5	6	7
						Fasilitasi Kunjungan Tamu
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
						Pengadaan Mebel
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan tepat waktu	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan
1	2	3	4	5	6	7
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan tepat waktu	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Meningkatnya kualitas pembangunan gender dan anak				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan		- Persentase ARG pada belanja langsung APBD - TPAK Perempuan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
				Terwujudnya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
						Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
						Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
						Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan
1	2	3	4	5	6	7
				Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
						Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota
				Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
						Pendampingan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan
1	2	3	4	5	6	7
						Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota
		Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan			Ratio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk)	
				Meningkatnya pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan dan TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
				Meningkatnya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
						Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Kab/Kota
						Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota
				Meningkatnya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan
1	2	3	4	5	6	7
						Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
						Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
				Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
						Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase keluarga yang Menerima Layanan Komprehensif bagi keluarga	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
				Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan
1	2	3	4	5	6	7
						Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
						Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah
				Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
						pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
						Peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan
1	2	3	4	5	6	7
				Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat pemanfaatan data gender terpilah	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
				Meningkatnya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
						Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
				Terjaminnya pemenuhan hak anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
				Terwujudnya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
						Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan
1	2	3	4	5	6	7
				Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
						Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
						Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
						Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		Meningkatnya perlindungan anak			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	
				Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani secara komprehensif	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan
1	2	3	4	5	6	7
				Meningkatnya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
						Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Meningkatnya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
						Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
						ayanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
						Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan
1	2	3	4	5	6	7
				Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
						Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota
						Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai
	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk					
		Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas			Indeks Pembangunan Keluarga	
				Terkendalinya pertumbuhan/pertambahan jumlah penduduk	ASFR	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan
1	2	3	4	5	6	7
				Terwujudnya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
						Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
						Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal
				Terwujudnya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
						Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
						Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
						Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan
1	2	3	4	5	6	7
						Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
						Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain
				Meningkatnya efektivitas Program Keluarga Berencana	- Persentase m-CPR - Unmetneed	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB
				Meningkatnya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
						Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
						Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan
1	2	3	4	5	6	7
						Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
						Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal
						Advokasi Program Bangga Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
				Terwujudnya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
						Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
						Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
				Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
						Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan
1	2	3	4	5	6	7
						Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
						Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
						Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
						Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
						Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
						Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB
				Meningkatnya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan
1	2	3	4	5	6	7
						Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
						Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
				Meningkatnya keberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
				Terwujudnya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan
1	2	3	4	5	6	7
						Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
				Terwujudnya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
						Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
						Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
				Meningkatnya Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)		Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan
1	2	3	4	5	6	7
						Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja
						Penyediaan Sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan
						Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya

(Sumber : Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar, 2025)

4.3 Sub Kegiatan

Sub bab ini berisi penjelasan uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas DP3APPKB Kabuapten Blitar selama periode perencanaan Tahun 2025–2029. Penyusunan program dan kegiatan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang memuat hasil pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan struktur program dan kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerah secara efisien dan akuntabel. Terdapat 10 program, 28 kegiatan dan 78 sub kegiatan Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar yang akan disajikan pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Rencana Pendanaan

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan administrasi perkantoran	Persen	80	88	4.682.189.635,22	88	4.696.637.514,81	88	4.743.892.847,55	88	4.776.301.646,89	88	4.839.466.915,12	88	4.888.169.629,32	88	4.888.169.629,32
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu dan	Persen	100	100	9.476.481,00	100	7.176.481,00	100	7.391.775,43	100	7.613.528,69	100	7.768.732,45	100	8.001.794,43	100	8.001.794,43

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	sesuai dengan peraturan																
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	2	5	4.115.414,00	5	4.115.414,00	3	4.238.876,42	3	4.366.042,71	3	4.497.023,99	3	4.631.934,71	3	4.631.934,71
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	761.067,00	1	761.067,00	3	783.899,01	3	807.415,98	3	831.638,46	3	856.587,61	3	856.587,61
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	1	2.300.000,00	1	2.300.000,00	1	2.369.000,00	1	2.440.070,00	1	2.440.070,00	1	2.513.272,10	1	2.513.272,10
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan	Data	1	1	2.300.000,00	1	2.300.000,00	1	2.369.000,00	1	2.440.070,00	1	2.440.070,00	1	2.513.272,10	1	2.513.272,10

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah																
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	Persen	100	100	3.251.900.999,22	100	3.251.900.999,22	100	3.531.004.236,49	100	3.460.133.902,33	100	3.460.133.902,33	100	3.461.198.999,73	100	3.461.198.999,73
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	25	24	3.218.435.784,22	24	3.218.435.784,22	28	3.496.535.065,04	28	3.424.630.655,74	28	3.424.630.655,74	28	3.424.630.655,74	28	3.424.630.655,74
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	61	250	31.209.000,00	250	31.209.000,00	310	32.145.270,00	340	33.109.628,10	370	33.109.628,10	400	34.102.916,94	400	34.102.916,94

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	2.256.215,00	1	2.256.215,00	1	2.323.901,45	1	2.393.618,49	1	2.393.618,49	1	2.465.427,05	1	2.465.427,05
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	Persen	100	80	315.121.006,00	80	315.121.006,00	100	506.120.843,47	100	521.304.468,77	100	459.102.472,43	100	279.226.888,89	100	279.226.888,89
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	21	20	61.674.495,00	20	61.674.495,00	20	63.524.729,85	20	65.430.471,75	20	65.430.471,75	20	67.393.385,90	20	67.393.385,90
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	Paket	5	5	24.000.000,00	5	24.000.000,00	5	24.720.000,00	5	25.461.600,00	6	25.461.600,00	6	26.225.448,00	6	26.225.448,00

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Tangga yang Disediakan																
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	12.198.481,00	1	12.198.481,00	1	12.564.435,43	1	12.941.368,49	1	13.329.609,55	1	13.729.497,83	1	13.729.497,83
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	18.000.000,00	1	18.000.000,00	12	18.540.000,00	12	19.096.200,00	14	19.669.086,00	14	20.259.158,58	14	20.259.158,58
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	70	85	199.248.030,00	85	199.248.030,00	85	386.771.678,19	90	398.374.828,54	90	335.211.705,14	90	151.619.398,57	90	151.619.398,57
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	453.250.000,00	100	373.000.000,00	100	106.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	yang Tersedia																
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	1	180.250.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	65	65	189.000.000,00	65	189.000.000,00		-	-	-		-		-		-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15	15	78.000.000,00	15	78.000.000,00		-	-	-		-		-		-
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	-	-		-		-		-

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan tepat waktu	Persen	80	100	558.262.653,00	100	575.010.532,59	100	592.260.848,57	100	594.744.059,00	100	612.586.380,77	100	630.963.972,19	100	630.963.972,19
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	78.022.133,00	12	80.362.796,99	12	82.773.680,90	12	85.256.891,33	12	87.814.598,07	12	90.449.036,01		90.449.036,01
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	480.240.520,00	12	494.647.735,60	12	509.487.167,67	12	509.487.167,67	12	524.771.782,70	12	540.514.936,18	12	540.514.936,18
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase jasa penunjang urusan	Persen	80	80	94.178.496,00	80	174.428.496,00	84	1.115.143,59	86	92.548.828,52	88	199.875.427,14	90	408.777.974,09	90	408.777.974,09

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Urusan Pemerintahan Daerah	pemerintahan daerah yang disediakan tepat waktu																
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	7	66.241.246,00	7	13.488.394,94	7	1.115.143,59	7	70.275.337,88	7	72.383.598,02	7	74.555.105,96	7	74.555.105,96
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	7	12.437.250,00	7	78.678.496,00	-	-	7	22.941.695,36	7	22.941.695,36	7	23.629.946,22	7	23.629.946,22

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	8	8	15.500.000,00	8	82.261.605,06	-	-	-	-	8	104.550.133,76	8	310.592.921,91	8	310.592.921,91
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	2	2	349.758.313,22	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENGARUSU TAMAAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	18,21	18,31	-	18,31	902.296.400,00	18,51	903.265.292,00	18,61	905.578.250,76	18,71	906.472.728,04	18,71	907.756.930,49	83,8	907.756.930,49
	TPAK	Persen	57,41	57,51		57,61		57,71		57,81		57,91		57,91		57,91	
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase SKPD yang menyusun dokumen PPRG untuk seluruh kegiatan strategis	Persentase	100	100	-	100	353.380.000,00	100	363.981.400,00	100	365.445.442,00	100	364.343.589,28	100	365.627.771,73	100	365.627.771,73

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	(sesuai RAT)																
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	Laporan	3	3	-	3	47.380.000,00	3	48.801.400,00	3	50.265.442,00	3	50.265.442,00	3	51.773.405,26	3	51.773.405,26
Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat Kab/Kota	Kebijakan	n/a	1	-	1	100.000.000,00	1	103.000.000,00	1	103.000.000,00	1	103.000.000,00	1	102.776.219,19	1	102.776.219,19
Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD Kab/Kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	n/a	n/a		32	203.000.000,00	32	208.680.000,00	32	208.180.000,00	32	206.578.147,28	32	206.078.147,28	32	206.078.147,28
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG	Laporan	n/a	n/a	-	1	3.000.000,00	1	3.500.000,00	1	4.000.000,00	1	4.500.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	kewenangan Kabupaten / Kota																
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media yang meningkatkan jumlah anggota perempuan setelah mengikuti sosialisasi /advokasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	Orang	1.850	2.000	-	2000	498.916.400,00	2300	487.784.529,00	2450	488.924.529,00	2600	490.920.859,00	2750	490.920.879,00	2900	490.920.879,00

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Lembaga	n/a	n/a	-	8	50.000.000,00	8	51.500.000,00	9	53.045.000,00	9	54.636.350,00	10	54.636.350,00	10	54.636.350,00
Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan	Jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan	Orang	n/a	70	-	75	448.916.400,00	75	436.284.529,00	80	435.879.529,00	85	436.284.509,00	90	436.284.529,00	90	436.284.529,00

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kabupaten/Kota	lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan																
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perempuan yang Dibina	Lembaga	20	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	51.499.363,00	20	51.208.279,76	20	51.208.279,76	20	51.208.279,76	20	51.208.279,76
Pendampingan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	n/a	n/a	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.299.363,00	5	10.299.363,00	5	10.299.363,00	5	10.299.363,00	5	10.299.363,00

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	Orang	2	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	41.200.000	2	40.908.916,76	2	40.908.927,00	2	40.908.907,00	2	40.908.907,00
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Persentase	100	100	-	100	255.436.599,29	100	263.099.697,27	100	270.992.688,19	100	279.122.468,83	100	287.496.142,90	100	287.496.142,90
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	Kasus	61	55	-	55	79.843.048,00		82.238.339,44		84.705.489,62	35	87.246.654,31	30	89.864.053,94	30	89.864.053,94

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang mendapatkan Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten /Kota	Orang	n/a	50	-	50	59.843.048,00	55	82.238.339,44	55	84.705.489,62	60	87.246.654,31	60	89.864.053,94	60	89.864.053,94
Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten /Kota	Kebijakan	n/a	n/a	-	1	20.000.000,00		-		-		-		-		-
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan	Persentase korban kekerasan pada perempuan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan	Persentase	100	100	-	100	79.053.551,29	100	81.425.157,83	100	83.867.912,56	100	86.383.949,94	100	88.975.468,44	100	88.975.468,44

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kabupaten/Kota																	
Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	55	55	-	55	39.526.775,65	50	40.712.578,91	50	41.933.956,28	45	43.191.974,97	45	44.487.734,22	45	44.487.734,22
Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	55	55	-	55	39.526.775,65	50	40.712.578,91	50	41.933.956,28	45	43.191.974,97	45	44.487.734,22	45	44.487.734,22

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pembinaan	Persen	28,57	32,14	-	32,14	96.540.000,00	32,14	99.436.200,00	33,14	102.419.286,01	34,14	105.491.864,59	35,14	108.656.620,53	35,14	108.656.620,53
Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	Orang	n/a	n/a	-	100	96.540.000,00	100	99.436.200,00	150	102.419.286,01	150	105.491.864,58	200	108.656.620,52	200	108.656.620,53
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase keluarga yang Menerima Layanan Komprehensif bagi keluarga	Persentase	28,27	28,70	-	29,20	3.433.348.234,00	29,70	3.511.348.681,00	30,20	3.742.439.141,00	30,70	3.751.712.316,00	31,20	3.811.612.816,00	31,2	3.811.612.816,00

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	Persentase	n/a	n/a	-	n/a	1.716.674.117,00	100	1.743.174.340,49	100	1.893.174.340,49	100	1.846.969.571,47	100	1.849.727.789,14	100	1.849.727.789,14
Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kebijakan	n/a	n/a	-	n/a	858.337.058,50	1	884.837.281,99	1	884.837.281,99	1	884.837.281,99	1	884.837.281,99	1	884.837.281,99
Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi	Orang	n/a	n/a	-	n/a	858.337.058,50	20	858.337.058,50	20	1.008.337.058,50	25	962.132.289,48	25	964.890.507,15	25	964.890.507,15

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah	dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten /Kota																
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten /Kota (Puspaga) yang	Lembaga	2	-	-	2	1.716.674.117,00	2	1.768.174.340,51	3	1.849.264.800,51	3	1.904.742.744,53	4	1.961.885.026,86	4	1.961.885.026,86

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Berkembang																
pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	n/a	n/a	-	n/a	858.337.058,50	2	909.837.282,01	3	965.927.742,01	3	1.021.405.686,03	4	1.078.547.968,36	4	1.078.547.968,36
peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Lembaga	n/a	n/a	-	1	858.337.058,50	1	858.337.058,50	2	883.337.058,50	2	883.337.058,50	3	883.337.058,50	3	883.337.058,50
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat pemanfaatan data gender terpilah	Persen	7,14	7,14	31.827.000,00	7,14	31.827.000,00	9,52	32.781.810,00	9,52	33.765.264,30	11,9	34.778.222,23	11,9	35.821.568,90	11,9	35.821.568,90

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	13	15	31.827.000,00	15	31.827.000,00	21	32.781.810,00	24	33.765.264,30	27	34.778.222,23	30	35.821.568,90	30	35.821.568,90
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	1	31.827.000,00	1	31.827.000,00	1	32.781.810,00	1	33.765.264,30	1	34.778.222,23	1	35.821.568,90	1	35.821.568,90
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak	Indeks	65,58	66,08	-	66,08	250.000.000,00	66,28	257.500.000,00	66,38	106.090.000,00	66,48	273.181.750,00	66,58	281.377.202,50	66,58	281.377.202,50
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	Persentase lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia	Persentase	100	n/a	-	100	50.000.000,00	100	51.500.000,00	100	53.045.000,00	100	54.636.350,00	100	56.275.440,50	100	56.275.440,50

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kewenangan Kabupaten/Kota	usaha kewenangan kabupaten/kota yang telah melembagakan PHA																
Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan	Lembaga	n/a	n/a	-	30	50.000.000,00	30	51.500.000,00	35	53.045.000,00	35	54.636.350,00	40	56.275.440,50	40	56.275.440,50

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Kabupaten / Kota																
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang dibina	Lembaga	n/a	n/a	-	50	200.000.000,00	80	206.000.000,00	100	53.045.000,00	110	218.545.400,00	120	225.101.762,00	120	225.101.762,00
Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Orang	n/a	n/a		100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	110	120.000.000,00	110	120.000.000,00	120	130.000.000,00	120	130.000.000,00

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	n/a	n/a		1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00
Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	n/a	n/a		3	75.000.000,00	3	81.000.000,00	3	81.000.000,00	4	73.545.400,00	4	70.101.762,00	4	70.101.762,00
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan	Persentase	100	100	-	100	439.875.646,35	100	453.071.915,74	100	466.664.073,21	100	480.663.995,41	100	495.083.915,27	100	495.083.915,27

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	yang ditangani secara komprehensif																
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan anak yang terlayani oleh instansi tingkat kabupaten/kota	Persentase	100	100	-	100	89.394.398,65	100	105.695.968,04	100	108.866.847,08	100	112.132.852,50	100	115.496.838,06	100	115.496.838,06
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	n/a	n/a	-	n/a	38.644.398,65	1	54.945.968,04	1	56.594.347,08	2	58.292.177,50	2	60.040.942,81	2	60.040.942,81

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	Kegiatan	n/a	n/a	-	6	50.750.000,00	6	50.750.000,00	7	52.272.500,00	7	53.840.675,00	8	55.455.895,25	8	55.455.895,25
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Jumlah	89	75	-	75	185.615.646,35	60	182.510.346,35	55	187.985.656,74	50	193.625.226,44	45	199.433.983,24	45	199.433.983,24
Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatk	Orang	89	75	-	75	61.871.882,12	60	60.836.782,12	55	62.661.885,58	50	64.541.742,15	45	66.477.994,41	45	66.477.994,41

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	an Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota																
Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	89	75	-	75	61.871.882,12	60	60.836.782,12	55	62.661.885,58	50	64.541.742,15	45	66.477.994,41	45	66.477.994,41
Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan	Orang	89	75	-	75	61.871.882,12	60	60.836.782,12	55	62.661.885,58	50	64.541.742,15	45	66.477.994,41	45	66.477.994,41

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	gan korban Tingkat Kabupaten / Kota																
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota yang dibangun	Lembaga	n/a	n/a	119.000.000,00	100	164.865.601,35	100	164.865.601,35	110	169.811.569,39	110	174.905.916,47	120	180.153.093,97	120	180.153.093,97
Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	Dokumen	2	2	119.000.000,00	2	119.000.000,00	2	119.000.000,00	2	122.570.000,00	3	126.247.100,00	3	130.034.513,00	3	130.034.513,00

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten /Kota yang mendapatkan bimtek	Orang	n/a	n/a	-	150	45.865.601,35	150	45.865.601,35	160	47.241.569,39	160	48.658.816,47	170	50.118.580,97	170	50.118.580,97
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								-		-		-			-		-
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	ASFR	Usia	18,70	18,60	588.580.500,00	18,5	872.162.498,45	18,40	913.658.033,40	18,30	935.193.611,08	18,20	948.829.419,41	18,10	977.294.301,99	18,10	977.294.301,99

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terpadu dan sinkron dengan Kebijakan Pemerintah Provinsi	Kebijakan	0	1	131.840.000,00	1	249.089.140,00	1	264.089.140,00	1	272.011.814,20	1	280.172.168,63	1	288.577.333,68	1	288.577.333,68
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	131.840.000,00	1	131.840.000,00	1	146.840.000,00	1	151.245.200,00	1	155.782.556,00	1	160.456.032,68	1	160.456.032,68

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Satuan Pendidikan	2	n/a	-	n/a	117.249.140,00	8	117.249.140,00	8	120.766.614,20	8	124.389.612,63	8	128.121.301,00	8	128.121.301,00
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah	Dokumen	2	2	456.740.500,00	2	623.073.358,45	1	649.568.893,40	1	663.181.796,88	1	668.657.250,79	1	688.716.968,31	1	688.716.968,31

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Kabupaten / Kota yang Tersusun dan Valid																
Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Dokumen	1	1	50.000.000,00	1	51.500.000,00	1	50.000.000,00	1	51.500.000,00	1	53.045.000,00	1	54.636.350,00	1	54.636.350,00
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	1	1	13.132.500,00	1	13.932.269,25	1	13.526.475,00	1	13.526.475,00	1	13.932.269,25	1	14.350.237,33	1	14.350.237,33
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	12	12	293.608.000,00	12	293.608.000,00	12	302.416.240,00	12	302.416.240,00	12	307.068.727,20	12	316.280.789,02	12	316.280.789,02

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	12	n/a	-	12	153.940.000,00	12	163.440.000,00	12	168.343.200,00	12	163.393.496,00	12	168.295.300,88	12	168.295.300,88
Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor	Unit	40	60	100.000.000,00	60	110.093.089,20	180	120.186.178,40	200	127.395.881,88	220	131.217.758,34	248	135.154.291,09	248	135.154.291,09

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Lain yang dibentuk																
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase m-CPR	Persentase	70,84	73,84	5.678.684.949,95	76,84	6.889.004.949,95	79,84	7.142.075.189,22	82,84	7.507.525.697,02	85,84	7.626.715.467,93	88,84	7.752.554.011,97	88,84	7.752.554.011,97
	Unmet Need	Persentase	8,6	8,5		8,4		8,3		8,2		8,1		8		8	
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah stakeholder /pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program	Stakeholder	10	15	1.915.140.000,00	15	2.065.140.000,00	10	2.635.699.120,00	10	2.614.770.039,60	10	2.659.886.211,12	10	2.722.293.686,33	10	2.722.293.686,33

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Bangga Kencana																
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaa n Operasiona l dan Sarana di Balai Penyuluha n Bangga Kencana (Pembangu nan Keluarga, Kependudu kan, dan Keluarga Berencana)	Lapora n	22	22	1.154.836.000,00	22	1.254.836.000,00	22	1.754.836.000,00	22	1.707.481.080,00	22	1.758.705.512,40	22	1.794.077.566,65	22	1.794.077.566,65
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Mekanisme Operasiona l Program Bangga Kencana (Pembangu nan Keluarga, Kependudu kan, dan	Lapora n	3	3	339.900.000,00	3	339.900.000,00	3	350.097.000,00	3	360.599.910,00	3	371.417.907,30	3	382.560.444,52	3	382.560.444,52

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) , Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																
Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta	Dokumen	3	2	89.404.000,00	2	139.404.000,00	2	143.586.120,00	2	147.893.703,60	2	152.330.514,71	2	156.900.430,15	2	156.900.430,15

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Media Luar Ruang																
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Dokumen	n/a	2	125.000.000,00	2	175.000.000,00	2	180.250.000,00	2	152.330.541,71	2	156.900.430,15	2	161.607.443,05	2	161.607.443,05
Advokasi Program Bangga Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana	Organisasi	10	15	206.000.000,00	15	206.000.000,00	15	212.180.000,00	15	218.545.400,00	15	225.101.762,00	15	231.854.814,86	15	231.854.814,86

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
dan Mitra Kerja	(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja,																
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB atau Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang berdayaguna (terlibat dalam Penyuluhan, Penggerakan dan Pelayanan serta Pengembangan	Persentase	100	100	702.460.000,00	100	852.460.000,00	100	878.033.800,00	100	904.374.814,00	100	931.506.058,42	100	959.451.240,17	100	959.451.240,17

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program KKBPk																
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	248	248	702.460.000,00	248	702.460.000,00	248	723.533.800,00	248	745.239.814,00	248	767.597.008,42	248	790.624.918,67	248	790.624.918,67
Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	n/a	n/a		2	150.000.000,00	2	154.500.000,00	2	159.135.000,00	2	163.909.050,00	2	168.826.321,50	2	168.826.321,50

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengendalian dan Pendistribusi an Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten /Kota Terpenuhi	Persentase	100	100	3.061.084.949,95	100	3.261.084.949,95	100	3.358.917.498,45	100	3.282.439.801,41	100	3.291.759.627,61	100	3.287.043.017,47	100	3.287.043.017,47
	- Persentase Kejadian Tidak Direncanakan (Jumlah ibu yang tidak ingin anak lagi dan ingin anak kemudian /Jumlah ibu hamil)		15	14,9		14,8		14,7		14,6		14,5		14,4		14,4	

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	12	12	40.788.000,00	12	90.788.000,00	12	93.511.640,00	12	96.316.989,20	12	99.206.498,88	12	102.182.693,84	12	102.182.693,84
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	7119	7805	2.661.809.430,00	7805	2.711.809.430,00	7000	2.793.163.712,90	7200	2.699.713.402,30	7400	2.691.587.436,52	7600	2.669.335.059,62	7600	2.669.335.059,62

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Laporan	-	-	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	51.500.000,00	10	53.045.000,00	10	54.636.350,00	12	56.275.440,50	12	56.275.440,50
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	19	19	293.037.519,95	22	293.037.519,95	22	301.828.645,55	22	310.883.504,91	22	320.210.010,06	22	329.816.310,36	22	329.816.310,36
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	2	2	15.450.000,00	2	15.450.000,00	2	15.913.500,00	2	16.390.905,00	2	16.882.632,15	2	17.389.111,11	2	17.389.111,11

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Orang	n/a	n/a	-	75	100.000.000,00	75	103.000.000,00	75	106.090.000,00	75	109.272.700,00	75	112.550.881,00	75	112.550.881,00
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan	Persen	80	80	560.320.000,00	80	710.320.000,00	80	264.424.770,77	80	705.940.988,01	80	743.563.570,78	80	783.766.068,00	80	783.766.068,00

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pembinaan Kesertaan Ber-KB yang Berdaya dan Berperan Aktif																
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	1	0	-	1	150.000.000,00	0	-	1	111.497.500,01	1	131.286.778,14	1	153.120.971,58	1	153.120.971,58
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan	Kampung	248	248	560.320.000,00	248	560.320.000,00	248	264.424.770,77	248	594.443.488,00	248	612.276.792,64	248	630.645.096,42	248	630.645.096,42

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	kan, dan Keluarga Berencana)																
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persentase	58,24	59,24	6.356.800.000,00	59,83	3.718.270.000,00	61,24	3.927.818.100,00	62,24	4.537.652.643,00	63,24	4.547.782.222,29	64,24	4.958.215.688,96	64,24	4.958.215.688,96
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif	Persen	82	86	312.000.000,00	86	1.709.000.000,00	88	1.709.000.000,00	90	2.252.270.000,00	92	2.319.838.100,00	94	2.688.019.600,50	94	2.688.019.600,50
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,	Laporan	1	2	3.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	904.000.000,00	2	931.120.000,00	2	1.233.053.600,00	2	1.233.053.600,00

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Keluarga Akseptor (UPPKA))	BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																
Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan	n/a	n/a	-	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	257.500.000,00	1	265.225.000,00	1	273.181.750,00	1,00	273.181.750,00
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,	Unit	10	10	309.000.000,00	10	809.000.000,00	14	809.000.000,00	16	833.270.000,00	18	858.268.100,00	20	908.602.500,50	20	908.602.500,50

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia																
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan	Orang	n/a	n/a	-	22	250.000.000,00	22	250.000.000,00		257.500.000,00	22	265.225.000,00	22	273.181.750,00	22	273.181.750,00

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase TPK yang turut serta aktif dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persen	n/a	n/a	-	100	1.259.270.000,00	100	1.446.318.100,00	100	1.489.707.643,00	100	1.408.398.872,29	100	1.450.650.838,46	100	1.450.650.838,46

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Laporan	n/a	n/a	-	10	250.000.000,00	10	250.000.000,00	10	257.500.000,00	10	265.225.000,00	10	273.181.750,00	10	273.181.750,00
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat	Laporan	n/a	n/a	-	10	1.759.270.000,00	10	1.968.818.100,00	10	2.027.882.643,00	10	1.962.719.122,29	10	1.997.014.338,46	10	1.997.014.338,46

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	pendampingan																

(Sumber: Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar, 2025)

4.4 Program, Kegiatan Dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

Berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029 dalam menunjang keberhasilan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui layanan kesehatan dan Pendidikan berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan, maka dirumuskan Agenda Prioritas yang diharapkan memiliki daya ungkit terhadap keberhasilan pencapaian sasaran Misi I yaitu: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Inklusif, Berakhlak, Sehat Jasmani Dan Rohani, Berpendidikan Yang Baik, Berdaya Saing, Melalui Pembangunan Keluarga Sejahtera Dan Optimalisasi Potensi Generasi Muda Yang Siap Menyongsong Indonesia Emas yang didukung Dinas P3APKB Kabupaten Blitar, antara lain:

- 1. Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Bagi Perempuan Kepala Rumah Tangga
- 2. Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan
- 3. Konvergensi penurunan stunting teintegrasi

Untuk mendukung agenda-agenda prioritas tersebut, Dinas P3APKB Kabupaten Blitar merumuskan program dan kegiatan yang akan disajikan pada tabel 4.3 sebagai berikut.

Tabel 4.3

Daftar Program Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan SDM yang Berkualitas, Berkarakter, dan Berdaya Saing, serta Penguatan Perlindungan Sosial
			Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelatihan dan pembekalan yang relevan bagi para petugas dan pengelola lembaga layanan.
2	Program Perlindungan Perempuan	Meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan menyusun kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan TPPO (Strada, RAD)
3	Program Pemenuhan Hak Anak	Terwujudnya pemenuhan hak anak	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha
			Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembentukan lembaga Forum Anak tingkat Kabupaten-Kecamatan-Desa/Kelurahan
4	Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Mengadakan pertemuan lintas sektor untuk menyamakan persepsi dan strategi dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak di tingkat daerah.

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
		lainnya terhadap anak		
			Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Menguatkan peran forum anak sebagai pelopor dan pelapor untuk meningkatkan partisipasi anak dalam upaya pencegahan.
5	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Menurunnya prevalensi stunting	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pertemuan untuk mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pendampingan Keluarga dan hasil dari pelaksanaan dan pemantauan pendampingan Keluarga di tingkat kecamatan
			Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dukungan pembiayaan operasional (honor dan kelengkapan) yang diberikan kepada Tim Pendamping Keluarga Resiko Stunting
6	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya keberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembinaan kelompok ketahanan keluarga mewujudkan keluarga sejahtera

(Sumber: Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar, 2025)

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Untuk mengetahui capaian kinerja perangkat daerah yang bertujuan untuk mendukung pencapaian Misi I RPJMD Kabupaten Blitar 2025-2029 dan sasaran RPJMD Kabupaten Blitar 2025 – 2029 yaitu : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Inklusif, Berakhlak, Sehat Jasmani Dan Rohani, Berpendidikan Yang Baik, Berdaya Saing, Melalui Pembangunan Keluarga Sejahtera Dan Optimalisasi Potensi Generasi Muda Yang Siap Menyongsong Indonesia Emas, maka disusun beberapa indikator kinerja perangkat daerah.

Dalam rangka mencapai keberhasilan tujuan dan sasaran pada Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar dengan RPJMD, maka diperlukan alat ukur yang disebut Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berfokus pada tujuan strategis. Penetapan IKU untuk mengendalikan kinerja, memantau kemajuan terhadap target, dan menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja. Indikator yang akan dicapai Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar dalam lima tahun mendatang akan disajikan dalam tabel 4.4 sebagai berikut.

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD 2024	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE						KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,65	93,8	93,95	94,1	94,25	94,4	94,4	94,4
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persentase	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
3	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,263	0,260	0,257	0,254	0,251	0,248	0,245	0,245
4	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk)	Rasio	12,44	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	11,440	11,44
5	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	67,87	67,97	68,07	68,17	68,27	68,37	68,47	68,47
6	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	Indeks	62	63,86	65,78	67,70	69,78	71,87	74,03	74,03
7	Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	50,20 (CC)	60,05 (B)	62,50 (B)	65,00 (B)	70,05 (BB)	72,50 (BB)	80,05 (A)	80,05 (A)

(Sumber: Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar, 2025)

4.6 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kungsi (IKK) lebih berfokus pada kegiatan operasional yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). IKK yang akan dicapai Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar dalam lima tahun mendatang akan disajikan tabel 4.5 sebagai berikut.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE						KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	TFR (Total Fertility Rate)	-	2,01	2	2	2	2	2	2	2
2	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	65	65,1	65,2	65,3	65,4	65,5	65,6	65,6
3	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	n/a	56,5	56,6	56,7	56,8	56,9	57	57
4	Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja	Indeks	82,7	82,7	82,8	82,9	83	83,1	83,2	83,2
5	Persentase Kampung KB Berkualitas yang Mandiri	Persentase	90,3	90,3	90,5	90,8	91,1	91,4	91,7	91,7

(Sumber: Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar, 2025)

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan Substansi

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar disusun berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selanjutnya, penyusunan Renstra Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar ditindaklanjuti berdasarkan Surat Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategi Perangkat Daerah. Selain itu, penyusunan Renstra juga mengamanatkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra PD disusun sebagai tujuan pedoman operasional pembangunan 5 (lima) tahun perangkat daerah, dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan, serta instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja. Renstra PD juga berfungsi sebagai dasar akuntabilitas kinerja, memastikan sinergi dan konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan. Renstra PD Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar juga memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat Nasional maupun Provinsi.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra PD disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan. Kaidah Pelaksanaan Setelah Renstra Perangkat Daerah ditetapkan, antara lain:

1. Seluruh aparaturnya melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 sampai dengan 2029 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 sampai dengan 2029 menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah.
2. Kepala Perangkat Daerah bersama seluruh aparaturnya melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.
3. Perangkat Daerah berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Strategis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar tahun 2025- 2029.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar merupakan proses sistematis untuk memastikan program dan kegiatan berjalan sesuai rencana, mencapai target sehingga pada akhirnya akan memberikan dampak yang maksimal. Pelaksanaan kegiatan disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan, dimana yang menjadi tolok ukurnya indikator kinerja utama (IKU) Perangkat Daerah. IKU yang disusun harus terukur, relevan dan berjangka waktu disesuaikan dengan Renstra PD dan RPJMD Tahun 2025-2029. Pada proses pengawasan pelaksanaan kegiatan, Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar menyusun pengendalian untuk mengidentifikasi potensi masalah dan mengambil tindakan korektif secepatnya, diantaranya: pengumpulan data dan informasi dan rapat koordinasi serta evaluasi kegiatan secara rutin. Tahapan akhir selanjutnya, dilakukan tahap evaluasi untuk menilai keberhasilan program secara keseluruhan, mengukur dampak dan menemukan pembelajaran yang dapat digunakan untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhirnya kami berharap mudah-mudahan Rencana Strategis Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar periode Tahun 2025-2029 dapat memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar selama 5 (lima) tahun kedepan.